



**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, *LEVERAGE* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2015–2019)**

Skripsi

Diajukan oleh :

Mugi Rahayu

022116127

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

AGUSTUS 2023



**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, *LEVERAGE* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG
KONSUMSI TAHUN 2015-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA)

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, *LEVERAGE* DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI
TAHUN 2015-2019**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Jumat, Tanggal 04 Agustus 2023


Mugi Rahayu
022116127

Menyetujui,

Ketua Penguji Sidang
(Dr Siti Maimunah SE, MSI, CPSP, CPMP, CAP)



Ketua Komisi Pembimbing
(Joko Suprianto, Ak., Mak., CA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Haqi Fadillah, SE, MAk., BKP, CertDA, CAP)



LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mugi Rahayu
NPM : 022116127
Judul Skripsi : Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Paten dan Hak cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten dan Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan

Bogor, 04 Agustus 2023



Mugi Rahayu

**©Hak Cipta Milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

MUGI RAHAYU. 022116127. Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019. Di bawah bimbingan : JOKO SUPRIANTO dan HAQI FADILLAH. 2023.

Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh Karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode Purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif bersifat verifikatif yang berfungsi sebagai penganalisis dan telah dikumpulkan. Data diuji dengan menggunakan *Eviews* 10 dengan menggunakan uji analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian secara parsial (1) Karakter Eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. (2) *Leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. (3) *Corporate Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian secara simultan yaitu (4) Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* secara simultan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: Karakter Eksekutif, *Leverage*, *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance*.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan penulis agar bisa menjadi lebih baik. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan kelancaran.
2. Kepada kedua orang tua penulis. Bapak Noto Sarwanto dan Ibu Kasmi yang telah bekerja keras membesarkan, mendidik dan dengan tiada hentinya memberikan kasih sayangnya, doa dan dukungan perhatian serta semangat yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., Ak., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., M.B.A., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas.
5. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak saran dan dengan kesabaran mengarahkan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak Haqi Fadillah, SE, MAk., BKP, CertDA, CAP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, menasehati mengarahkan dan memberikan saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

8. Kepada kakak-kakak penulis, Melani Saputri dan Putri Wulandari yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik, seperjuangan disaat senang maupun duka yaitu Marisa Meiningtyas, Fauziah Isfahani, Susan Radja, Fadhia Salaswati dan Nur Annisa Subagja yang telah memberikan semangat dan saran dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Korp Sukarela Unit Universitas Pakuan yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
11. Kepada seluruh teman-teman Kelas D Akuntansi Angkatan 2016 dan teman-teman Akuntansi Perpajakan atas kebersamaan dan dukungan selama menjadi mahasiswa Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu mendukung penulis dari awal kuliah sampai dengan terselesaikannya penulisan ini.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang membacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bogor, Agustus 2023

Penulis,

Mugi Rahayu

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
LEMBAR HAK CIPTA.....	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Maksud Peneitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
4.1.1 Kegunaan Praktis	7
4.1.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	8
2.2 Pajak.....	8
2.2.1 Fungsi Pajak.....	9
2.2.2 Jenis-jenis Pajak.....	10
2.2.3 Subjek Pajak	11
2.2.4 Objek Pajak.....	11
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	12
2.4 Karakter Eksekutif	14
2.5 <i>Leverage</i>	15

2.6	Corporate Governance	16
2.7	Penelitian Terdahulu	17
2.8	Kerangka Pemikiran	22
2.8.1	Pengaruh Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan <i>Risk</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	22
2.8.2	Pengaruh <i>Leverage</i> yang diproksikan dengan DAR Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23
2.8.3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> yang diproksikan dengan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	23
2.8.4	Pengaruh Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	24
2.9	Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		26
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian	26
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	26
3.4	Operasionalisasi Variabel	27
3.5	Metode Penarikan Sampel	28
3.6	Metode Pengumpulan Data	31
3.7	Metode Analisis Data	31
3.7.1	Statistik Deskriptif	32
3.7.2	Model Regresi Data Panel	32
3.7.3	Kepemilikan Model Estimasi Data Panel	33
3.7.4	Uji Asumsi Klasik	34
3.7.5	Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN		38
4.1	Hasil Pengumpulan Data	38
4.1.1	Karakter Eksekutif	39
4.1.2	<i>Leverage</i>	41
4.1.3	<i>Corporate Governance</i>	43
4.1.4	<i>Tax Avoidance</i>	45
4.2	Analisis Data	47
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	47
4.2.2	Pemilihan Model	48
4.2.3	Transformasi Data	50
4.2.4	Uji Asumsi Klasik	51
4.2.5	Analisis Regresi Data Panel	53

4.2.6 Pengujian Hipotesis	54
4.3 Pembahasan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Sebelumnya	22
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	28
Tabel 3.2 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.....	29
Tabel 3.3 Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian	31
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Karakter Eksekutif (<i>Risk</i>) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.....	39
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan <i>Leverage</i> (DAR) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019...42	
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan <i>Corporate Governance</i> (Komisaris Independen) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.....	44
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019....	46
Tabel 4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Chow.....	49
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Model Data Panel.....	50
Tabel 4.9 Hasil Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Data Panel.....	53
Tabel 4.11 Kesimpulan Pengujian Hipotesis.....	56
Tabel 4.12 Rata-rata Karakter Eksekutif dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019.....	57
Tabel 4.13 Rata-rata <i>Leverage</i> dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019.....	58
Tabel 4.14 Rata-rata <i>Corporate Governance</i> dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015- 2019.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rata-rata Karakter Eksekutif (Risk), Leverage (DAR), dan Corporate Governance (IND) Terhadap Tax Avoidance (ETR) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Pergerakan Risk Pada Perusahaan Sekor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.....	40
Gambar 4.2 Pergerakan <i>Leverage</i> Perusahaan Sektor Industri Barang Komsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.....	42
Gambar 4.3 Pergerakan <i>Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.....	44
Gambar 4.4 Pergerakan <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.	46
Gambar 4.5 Uji Normalitas.....	51
Gambar 4.6 Hasil Uji Heterokedatisitas.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Karakter Eksekutif (<i>Risk</i>) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	68
Lampiran 2 Perhitungan <i>Leverage</i> Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	71
Lampiran 3 Perhitungan <i>Corporate Governance</i> (IND) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	74
Lampiran 4 Perhitungan <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena penting belakangan ini bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia. Yang merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam APBN. Pajak bagi pemerintah merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara, penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sehingga perlu pengelolaan yang baik untuk memaksimalkannya (Fransiska 2017).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, berkewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak dianggap sebagai biaya bagi suatu perusahaan. Perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai suatu perwujudan atas penyisihan asset dalam bentuk pembayaran pajak dari pemilik atau pihak perusahaan kepada pemerintah. Pemikiran mengenai pajak sebagai biaya memotivasi pihak badan usaha untuk melakukan *tax planning*. Menurut Mangoting (1999) perencanaan pajak merupakan suatu usaha dalam proses pengorganisasian wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Tarif pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan secara umum kepada WP Badan adalah sebesar 25%. Tingginya tarif yang dikenakan ini menyebabkan keengganan pihak wajib pajak untuk membayar pajak karena dianggap membebani perusahaan. Bahkan beberapa perusahaan mengambil resiko melakukan tindakan yang melanggar hukum agar tidak membayar pajak. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktik menghindari pajak baik yang dilakukan secara legal dan illegal.

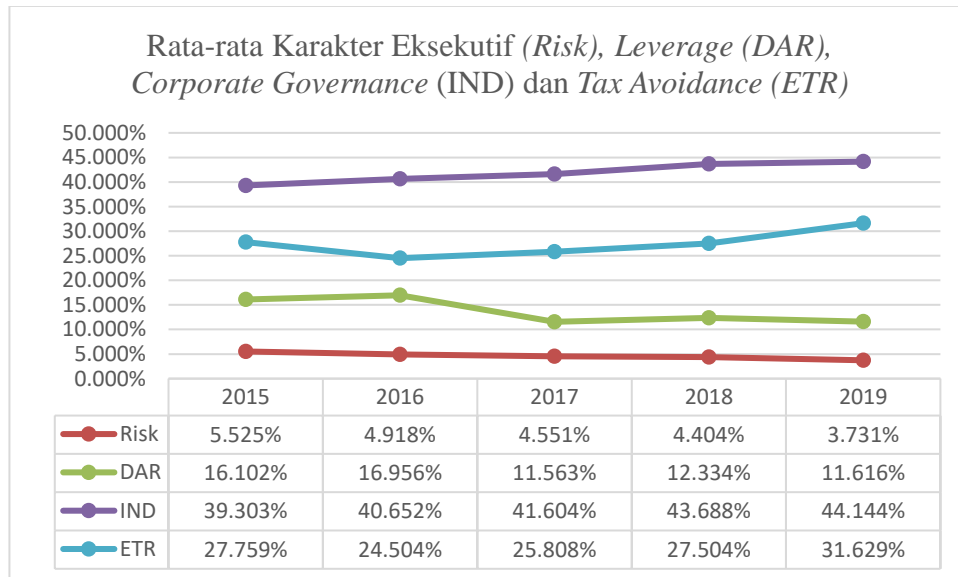
Pada awal tahun 1984, pemerintah mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang semula merupakan *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. Sistem penilaian resmi adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak kepada pemerintah, Sedangkan *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Siti Resmi, 2014:11). Dengan diterapkannya *self assessment system*, wajib pajak dituntut untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, hal ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak pada perusahaan menjadi lebih rendah.

Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara illegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Dengan kata lain, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam efisiensi beban pajak.

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia, sebanyak 18 perusahaan Sinar Mas Group diduga melakukan pengemplangan pajak yang merugikan daerah Riau sekitar 400 miliar pada tahun 2018 lalu. Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardirman Amby menuturkan, pihaknya sudah melakukan hitungan terhadap kekurangan bayar pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH). Berdasarkan laporan dari pihak Sinar Mas dan Pemprov Riau, Sinar Mas hanya menyetorkan sebesar Rp 84 miliar sepanjang 2018. “kita hitung potensinya sesuai p16, dimana besaran pajak adalah Rp 8.400/ton, sedangkan kapasitas ton kayu dipabrik indah kiat adalah 12 juta ton pertahunnya, berarti potensi pajaknya Rp 1,8 T” jelasnya. Apabila dihitung dengan mensimulasikan kayu di pabrik dari Riau sebanyak 50 persen, pihakya menemukan angka sebesar Rp 540 miliar. Sesuai dengan P64, pembagian pajak ini dibagi menjadii 80 persen untuk Riau dan 20 persen untuk pemerintah pusat sehingga hak Riau atas pajak tersebut digelapkan oleh pihak perusahaan.” berarti hak Riau atas pajak itu adalah Rp 400 miliar, tapi pengakuan Direktornya pak Edi Haris mereka hanya menyetor Rp 84 miliar, berarti ada penggelapan pajak sebesar Rp 400 miliar lebih,” tambahnya. Suara.com (2019)

Berikut adalah nilai rata-rata karakter eksekutif, *leverage*, *corporate governance* dan *tax avoidance* Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2019:



Sumber: www.idx.co.id (diolah oleh penulis, 2021)

Gambar 1. 1 Rata-rata Karakter Eksekutif (*Risk*), *Leverage (DAR)*, dan *Corporate Governance (IND)* Terhadap *Tax Avoidance (ETR)* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Berdasarkan gambar diatas, nilai rata-rata Karakter Eksekutif yang diprosikan dengan *risk* terdapat Gap pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Rata-rata karakter eksekutif pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,551% sedangkan *Tax Avoidance* mengalami kenaikan sebesar 25,808%. Kemudian pada tahun 2018 karakter eksekutif mengalami penurunan menjadi 4,404% sedangkan *Tax Avoidance* meningkat menjadi 27,504%. Selanjutnya pada tahun 2019 karakter eksekutif juga mengalami penurunan sedangkan *Tax Avoidance* juga meningkat sebesar 31,629%. Pada penelitian ini Karakter Eksekutif diprosikan menggunakan *risk*. Menurut Adelia (2016) semakin tinggi adanya resiko perusahaan maka karakter *risk taker* semakin berperan di dalam perusahaan, yang artinya jika eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Begitupun sebaliknya jika tingkat risiko perusahaan semakin rendah maka eksekutif perusahaan bersifat *risk averse* yang mencerminkan berkurangnya aktivitas penghindaran pajak. Namun jika dilihat pada gambar 1.2 terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan teori tersebut.

Berdasarkan gambar diatas, Nilai rata-rata *Leverage* yang diprosikan dengan DAR terdapat Gap pada tahun 2018. Rata-rata *leverage* terlihat pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,334% sedangkan *Tax Avoidance* juga meningkat menjadi 27,504%. Sedangkan menurut teori, jika semakin besar nilai hutang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Tetapi perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2018 *leverage* tinggi praktik penghindaran pajaknya pun juga tinggi.

Nilai rata-rata *Corporate governance* yang diproksikan oleh Komisaris Independen (IND), terdapat Gap pada tahun 2016. Rata-rata komisaris independen pada tahun 2016 meningkat sebesar 40,625% sedangkan rata-rata *Tax Avoidance* nya menurun menjadi 24,504%. Sedangkan menurut teori, jika semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Begitupun sebaliknya jika komisaris independennya rendah maka praktik penghindaran pajaknya pun juga semakin rendah. Tetapi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2015 rata-rata komisaris independen tinggi praktik penghindaran pajaknya pun rendah.

Dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa terdapat fenomena pada perusahaan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2015-2019, tingkat karakter eksekutif yang diproksikan oleh *Risk* terus menurun setiap tahunnya. Namun pada rata-rata *Leverage* cenderung mengalami fluktuatif. Selanjutnya nilai rata-rata *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen (IND) juga cenderung mengalami fluktuatif. Kemudian tingkat rata-rata penghindaran pajak juga cenderung fluktuatif tidak mengikuti tingkat karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance*. Dalam hal ini setiap perubahan nilai dari karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* tidak diimbangi dengan perubahan praktik penghindaran pajak atau setiap kenaikan dan penurunan nilai karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* tidak diikuti oleh penghindaran pajak perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunissa Alviani (2016) dan Adelia Ratnasari (2016) menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Adapun pada penelitian yang dilakukan Zulfandi dkk (2017) mendapat hasil Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Widia Kurniasari dkk (2019) dan Franciska Marintan Napitupulu (2017), menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Adelia Ratnasari (2016) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu Uun & Puput (2016), Melia & Heidy (2018) menyatakan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rully & Indra (2018), Zulfandi dkk (2017) dan Khoirunissa Alviani (2016) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Cahyaning Dewi Handayani (2015) dan Christine Meidalina dkk (2019) menyatakan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah peneliti ini lebih memfokuskan variabel karakter eksekutif, dengan menambahkan variabel *leverage* dan *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independent. Selain itu penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Perusahaan ini merupakan

perusahaan sektor penyumbang dan pemicu utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri barang konsumsi sangat dibutuhkan karena semakin hari semakin terjadi peningkatan kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, selain itu adapun makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok manusia.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, serta kegiatan usaha pada perusahaan sektor industri barang konsumsi memiliki kontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil berjudul "PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, *LEVERAGE* DAN *CORPORATE GOVENANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015–2019)".

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, namun dalam sisi perusahaan pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan dengan hal ini banyak perusahaan yang berupaya meminimalisir nilai pajak dengan *tax avoidance* salah satunya.
2. Terdapat gap pada 2017, 2018 dan 2019 dimana nilai rata-rata karakter eksekutif menurun sedangkan *Tax Avoidance* meningkat. Berdasarkan teori hal ini tidak seperti kedua karakter risk yang berperan di dalam perusahaan.
3. Pada tahun 2018 pada nilai rata-rata *leverage* terlihat meningkat menjadi 12,334% sedangkan *Tax Avoidance* juga meningkat menjadi 27,504%. Sedangkan menurut teori, jika semakin besar nilai hutang perusahaan maka semakin rendah praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan.
4. Selain itu pada tahun 2016 pada nilai rata-rata komisaris independen meningkat sebesar 40,625% sedangkan rata-rata *Tax Avoidance* nya menurun menjadi 24,504%. Hal ini juga tidak sesuai dengan teori, jika semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
5. Terdapat perbedaan hasil dari peneliti terdahulu yang menyebabkan penelitian ini layak untuk diteliti kembali.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan *Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan proposal, dan memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan agar dapat dipelajari dan diolah menjadi data yang akurat. Selain itu juga penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi para pembaca.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, antara lain:

1. Untuk menguji dan menjelaskan apakah Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan *Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menjelaskan apakah *Leverage* yang diproksikan dengan DAR berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menjelaskan apakah *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menjelaskan apakah Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax*

Avoidance pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan yang melakukan pengungkapan beban pajak dan mengantisipasi masalah yang ada pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya serta akuntansi perpajakan pada khususnya dalam membantu pengambilan keputusan pihak manajemen perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan sebagai informasi dan menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan salah satu cara untuk lebih memahami ekonomi informasi dengan memperluas satu individu menjadi dua individu yaitu agen dan principal. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Adelia, 2016) teori ini menjelaskan hubungan antara agen (manajemen usaha) dan principal (pemilik usaha). Bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik.

Menurut Rosalia & Sapari (2017), Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, agent menuntut principal untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan permintaan agent.

Menurut Herlina (2019) Teori keagenan menyatakan adanya asimetri informasi antara agent dan principal karena agent lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan principal. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan agent untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin. Hal ini dilakukan agen karena dengan melakukan manajemen pajak maka agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan principal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa teori keagenan adalah hubungan kontrak antara pemilik perusahaan dengan manajemen untuk melakukan suatu jasa yang dimana pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada agen. Sehingga secara sistematis memperlihatkan pelaksanaan jasa atas kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian imbalan khusus yang memuaskan dari principal ke agent. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila seorang manajer perusahaan (agen) memanfaatkan jabatannya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan untuk keperluan pribadinya, dimana seorang agent menggerakkan perusahaan dan mengambil keputusan termasuk keputusan dalam penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

2.2 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Menurut UU No.36 Tahun 2008 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Agra (2018) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu negara. Di lain pihak pajak mempunyai peran dalam pembangunan perekonomian negara melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan negara seperti dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat, mensubsidi barang kebutuhan masyarakat hingga membayar hutang ke luar negeri.

Berdasarkan definisi diatas pajak dapat diartikan sebagai sumber pendapatan terbesar negara dan juga suatu peranan penting bagi perekonomian negara. pemerintah melakukan usaha untuk mendorong pendapatan negara yang berasal dari pajak agar terus mengalami peningkatan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat 70% lebih penerimaan Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak ada jasa timbal balik (kontrasprestasi individual) oleh pemerintah daerah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Contohnya:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk mengurangi konsumsi rokok.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Berdasarkan fungsi diatas, pajak merupakan sebagai fungsi penerimaan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya kesemuanya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golonganya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: pajak penghasilan
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.3 Subjek Pajak

Menurut mardiasmo (2018) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.4 Objek Pajak

Menurut undang-undang No.36 Tahun 2008 yang termasuk objek pajak yaitu:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Pohan 2016).

Menurut Oktamawati (2017) *Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar aturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan.

Menurut Achmad (2017) Penghindaran pajak juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Satu rancangan transaksi dapat mengurangi present value dari pembayaran pajak, tetapi jika penghematan tersebut menyebabkan biaya non-pajak yang lebih besar pada area lain di organisasi, transaksi tersebut bukan merupakan perencanaan pajak yang efisien.

Menurut Tati Yulia, dkk (2017) penghindaran pajak merupakan salah satu cara perlawanan terhadap pajak, dimana perlawanan pajak adalah hambatan-

hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif biasanya berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat, jadi masyarakat disini tidak melakukan upaya perlawanan yang sistematis dalam menghambat penerimaan negara tetapi lebih cenderung kepada kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Contohnya: masyarakat menyimpan uang dirumah ataupun dibelikan emas semua itu dilakukan bukanlah untuk menghindari pajak penghasilan dari bunga tetapi karena mereka belum terbiasa dengan perbankan.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yaitu dimana usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak dilakukan secara legal dan tidak melanggar atas ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penggelapan Pajak (*tax evasion*), yaitu dimana usaha yang dilakukan disini secara terang-terangan melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan.
- c. Melalaikan Pajak.

Tetapi disini peneliti hanya berfokus pada pengukuran atau faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut komite urusan fiskal dari *organisation for economic cooperation and development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter tindakan *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak, dalam (Tiara, 2017):

- a. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan *loopholrs* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c. Kerahasiaan dalam hal ini biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Dalam penelitian ini, penulis menghitung penghindaran pajak dengan menggunakan rumus *Effective Tax Ratio* (ETR) sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *Tax Avoidance*, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* pada intinya merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu secara perorangan atau badan. Dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap illegal.

Penghindaran pajak ini menjadi suatu penghalang dalam melakukan pemungutan pajak yang menyebabkan penghasilan negara berkurang. Adanya tindakan *Tax Avoidance* akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan tindakan yang direncanakan untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan yang melakukan cara-cara ilegal atau yang baik atau tidak melanggar undang-undang perpajakan dengan legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa resiko yang dapat ditanggung oleh Wajib Pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) seperti denda, publisitas, dan reputasi.

2.4 Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif adalah suatu karakter yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan. Menurut Herlina (2019) karakter eksekutif adalah dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda beda. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter, yaitu sebagai berikut:

1. *Risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi.
2. *Risk Averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Menurut Oktamawati (2017) karakter eksekutif adalah kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan perusahaan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*.

Menurut Wendaka, Eny dan Syaiful (2019) risiko perusahaan dapat diukur dengan cara menghitung EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation*) dibagi dengan total asset perusahaan. Tingginya rendahnya *corporate risk* akan

menunjukkan kecenderungan karakter eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Dimana perusahaan yang nilai risikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*. Sebaliknya perusahaan yang nilai risikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk averse*. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Risk = \frac{\Delta Ebitda t - t_{-1}}{\Delta Total Aset Perusahaan t - t_{-1}}$$

Risk= Resiko Perusahaan

Ebitda= Standar Deviasi dari Laba Sebelum Pajak

t= Tahun Penelitian

t-1= Tahun sebelumnya

Berdasarkan definisi dari karakter eksekutif dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif merupakan seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan dalam perusahaan, yang bertugas sebagai penggerak dari proses kegiatan-kegiatan dalam organisasi perusahaan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya seorang pimpinan perusahaan dapat didedikasikan sebagai pimpinan yang mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*.

2.5 Leverage

Menurut Achmad (2017) *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tingkat pengelolaan kewajiban (*leverage*) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah didanai lebih banyak menggunakan kewajiban atau modal yang berasal dari pemegang saham. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula *agency cost*.

Menurut Nawang (2020) *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktiva tetapnya. Peningkatan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan berkurang.

Leverage diprosikan menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dan total aset. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk berinvestasi pada aset untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. DAR digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan total hutang. Rumus perhitungan *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

DAR= *Debt to Total Asset Ratio*

Total Liability= Total Hutang Jangka Panjang

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Jika semakin tingginya *leverage* perusahaan maka semakin besar jumlah risiko yang ditanggung. Dengan kata lain jika suatu perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi maka akan memiliki beban pajak yang lebih kecil.

2.6 Corporate Governance

Menurut Taty & Supri (2017) *Corporate governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini menguji adanya pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak yang diproksikan oleh komisaris independen yang merupakan lapisan teratas dalam struktur organisasi perusahaan.

- **Komisaris Independen**

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$IND = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan=

IND= Proporsi Komisaris Independen

\sum Komisaris Independen= Jumlah Komisaris Independen

\sum Anggota Dewan Komisaris= Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan dari definisi diatas komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, sehingga tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Karakter Eksekutif, *Leverage*, *Corporate Governance* ataupun Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk penulis mengembangkan penelitian mengenai hal tersebut. Dibawah ini merupakan table beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Widia Kurniasari, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2019); Pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>leverage</i> Dependen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Laba setelah pajak • Total asset • Total liabilitas • Total ekuitas • Pembayaran pajak • Laba sebelum pajak 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan <i>Eviews 10</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Khoirunnisa Alviyani (2016); Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Eksekutif, • Ukuran Perusahaan • <i>Corporate Governance</i> Dependen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak efektif • Proporsi liabilitas jangka panjang • Presentase komisaris independen • Total asset • Jumlah komite audit 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris independen, Karakter eksekutif dan Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>). <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					n pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
3	Cahyani Dewi Handayani (2015); Pengaruh <i>Return On Asset</i> , Karakteristik Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013.	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Eksekutif, Dimensi Tata Kelola Perusahaan Dependen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak efektif • ROA • Laba bersih • Total asset • Presentase kepemilikan institusional • Presentase komisaris independen • Jumlah komite audit 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Return on asset</i> dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap aktivitas <i>Tax Avoidance</i> . Sedangkan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas <i>Tax Avoidance</i> .
4	Zulfandi Ramanda Rangkuti, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2017); Pengaruh karakter eksekutif dan <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> (pada perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015)	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Karakter eksekutif • <i>Leverage</i> Dependen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • EBITDA • Total utang • Total ekuitas • Beban pajak penghasilan • Laba sebelum pajak 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan <i>leverage</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , secara parsial karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	Franciska Marintan Napitupulu (2017); Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Perusahaan Dependen <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Pajak Efektif • Total asset • Proporsi Hutang jangka Panjang • Presentase asset tetap perusahaan • Jumlah inventory perusahaan 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Inventory intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan. <i>Size</i> atau ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> perusahaan. Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory intensity</i> tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Rully gartika dan indra Wijaya (2018); Pengaruh Karakteristik perusahaan dan karakter eksekutif terhadap	Independen <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Eksekutif 	<ul style="list-style-type: none"> • Total utang • Utang jangka panjang 	Metode sampel menggunakan teknik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	penghindaran pajak (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015)	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik Perusahaan <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Penghindaran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Total asset ROA Laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan 	purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi berganda.	negatif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Adelia Ratnasari (2016); Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Penghindaran Pajak (studi empiris pada perusahaan Manufaktur industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015)	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> Karakteristik Eksekutif Ukuran Perusahaan <i>Leverage</i> Profitabilitas <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Tarif pajak efektif Resiko perusahaan dengan Ebitda Total asset ROA dalam mengukur profitabilitas 	Metode sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software eviews 9.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif (<i>RISK</i>) dan ukuran perusahaan (<i>SIZE</i>) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan leverage (<i>DR</i>) dan Probabilitas (<i>ROA</i>) memiliki pengaruh yang negative terhadap penghindaran pajak.
8	Melia Sari dan Heidy Paramitha Devi (2018); Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan profitabilitas terhadap	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Corporate Governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi jumlah saham Komite audit 	Metode pengambilan sample dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>tax avoidance</i> (pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Laba bersih • Total asset • Beban pajak penghasilan • Pendapatan sebelum pajak 	purposive sampling. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda.	institusional, komisaris independent, dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Uun Sunarsih dan Puput Handayani (2016); Pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional • Kepemilikan manajerial • Dewan komisaris independent • Komite audit • Kualitas audit • Kompensasi eksekutif <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak efektif • Proporsi kepemilikan institusional • Proporsi kepemilikan manajerial • Proporsi komisaris independent • Komite audit 	Metode penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis menggunakan persamaan regresi berganda dengan SPSS.	Kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent, berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Christine Meidalina, Ketut Sunarta, dan Haqi Fadillah (2019); Pengaruh Profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2018	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • <i>Leverage</i> • <i>Corporate Governance</i> <p>Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran pajak • Laba sebelum pajak • Harga pokok penjualan • Penjualan • Laba bersih setelah pajak • Total asset • Utang jangka panjang 	Metode yang digunakan purposive sampling dengan analisis statistika inferensial yaitu regresi dan kolerasi menggunakan <i>Eviews</i> 10.	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>corporate governance</i> yang diprosikan dengan komisaris independent tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			• Total utang		terhadap <i>tax avoidance</i> . Kemudian secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Berikut penjelasan lebih ringkas dari tabel 2.1 diatas:

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Sebelumnya

Variabel independen	Variabel dependen (<i>Tax Avoidance</i>)	
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Karakter Eksekutif	(Khoirunnisa Alviyani 2016), (Adelia Ratnasari 2016), (Cahyani Dewi Handayani 2015), (Zulfandi, Dudi, dan Kurnia 2017), (Rully gartika dan indra Wijaya 2018).	
<i>Leverage</i>	(Widia Kurniasari 2019), (Franciska Marintan Napitupulu 2017), (Adelia Ratnasari 2016), (Christine Meidalina, Ketut Sunarta, dan Haqi Fadillah 2019).	(Rully gartika dan indra Wijaya 2018), (Zulfandi dkk 2017), (Khoirunnisa Alviyani 2016).
<i>Corporate Governance</i>	(Khoirunnisa Alviyani 2016), (Uun dan Puput 2016), (Melia Sari dan Heidy Paramitha Devi 2018).	(Cahyaning Dewi Handayani 2015), (Christine Meidalina, Ketut Sunarta, dan Haqi Fadillah 2019).

(Sumber diolah oleh peneliti, 2022)

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan atau digambarkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance*, dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Berikut ini adalah kerangka penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini.

2.8.1 Pengaruh Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan *Risk* Terhadap *Tax Avoidance*

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam variabel karakter eksekutif yang diproksikan oleh *risk* merupakan seorang pimpinan perusahaan dapat didedikasikan sebagai pimpinan yang mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*

dalam menjalankan tugasnya. Dimana semakin tinggi adanya resiko perusahaan maka karakter *risk taker* semakin berperan di dalam perusahaan, yang artinya jika eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Begitu pula sebaliknya jika tingkat risiko perusahaan semakin rendah maka eksekutif perusahaan bersifat *risk averse* yang mencerminkan berkurangnya aktivitas penghindaran pajak. Dari pernyataan tersebut diduga karakter eksekutif yang diproksikan oleh *risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Cahyani Dewi Handayani (2015), Khoirunnisa Alviyani (2016), Adelia Ratnasari (2016), Zulfandi dkk (2017), Rully dan Indra (2018) yang menyatakan terdapat pengaruh antara Karakter eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.

2.8.2 Pengaruh *Leverage* yang diproksikan dengan DAR Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antar hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. *Leverage* menunjukkan banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Semakin besar perusahaan menggunakan hutang untuk memperoleh aset yang berarti semakin menambahnya beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka akan mengurangi beban pajak. Dari pernyataan tersebut diduga *leverage* yang diproksikan oleh DAR berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Widia Kurniasari (2019), Franciska Marintan Napitupulu (2017) Adelia Ratnasari (2016), dan Christine Meidalina dkk (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh antara *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

2.8.3 Pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

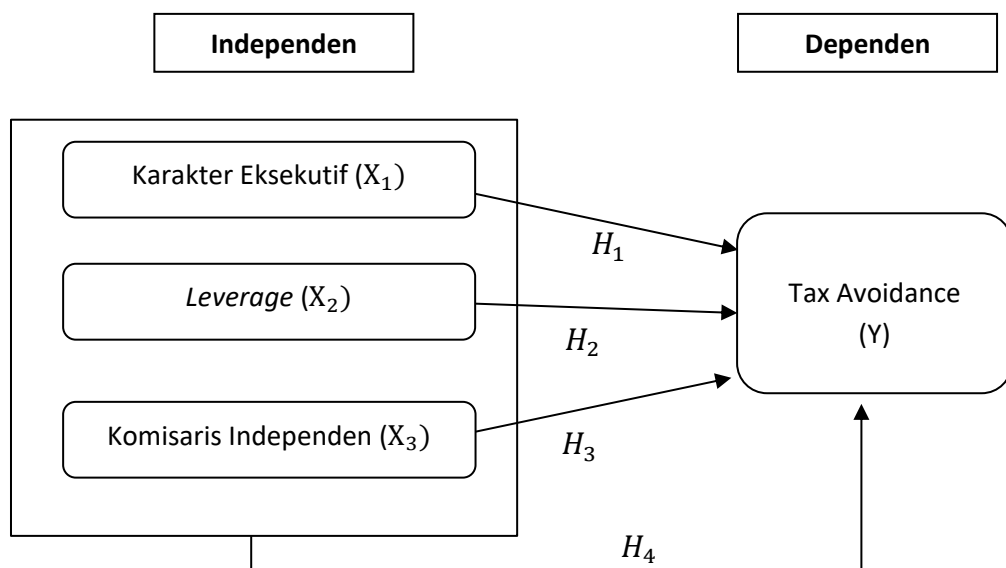
Komisaris independen dengan jumlah minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dewan Komisaris yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Tugas Komisaris Independen adalah mewakili pemegang saham untuk melakukan pengawasan kepada Direksi perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan agar target-target kinerja perusahaan yang ditetapkan pemegang saham dapat tercapai. Dewan Komisaris ditunjuk oleh pemegang saham jadi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris sangat dipengaruhi oleh pemegang saham, karena sewaktu-waktu pemegang saham dapat memberhentikan Dewan Komisaris kalau tidak bekerja sesuai keinginan pemegang saham. Kaitannya dengan *tax avoidance*, Komisaris Independen atau juga Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memastikan agar pelaksanaan *tax avoidance* berjalan efektif, tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan dapat mencapai tujuannya secara optimal. Dari pernyataan tersebut diduga *Corporate Governance* yang diproksikan oleh komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung

oleh penelitian Khoirunnisa (2016), Uun Sunarsih dan Puput Handayani (2016), Melia dan Heidy (2018) menyatakan terdapat pengaruh antara Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.

2.8.4 Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Karakter eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisin kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi, berbeda dengan karakter eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam penelitian ini tinggi rendahnya risiko perusahaan mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. Sedangkan *leverage* dapat menggunakan proporsi hutang jangka Panjang dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang menggunakan pendanaan dengan hutang akan memiliki *effective tax rate* lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pendanaan ekuitas. Selain karakter eksekutif dan *leverage* yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, *corporate governance* juga mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini Komisaris Independen melakukan tugasnya untuk mengawasi dan memastikan agar pelaksanaan *tax avoidance* berjalan efektif, tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan dan dapat mencapai tujuannya secara optimal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan dugaan tersebut dengan menguji kebenaran lebih lanjut. Dari uraian diatas, maka penulis dapat membuat hipotesis sementara mengenai pengaruh karakter eksekutif, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H_1 : Karakter Eksekutif yang diproksikan dengan *Risk* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_2 : *Leverage* yang diproksikan dengan DAR berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_3 : *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

H_4 : Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode Verifikatif dengan metode *Explanatory Survey* dan Teknik Statistik Inferensial. Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Metode verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antar variable melalui suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga dapat dihasilkan pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Menurut Pedoman Skripsi (2021:32) metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variable. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh karakter eksekutif, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. Dengan menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif, *leverage*, dan *corporate governance* baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* adalah sumber data yang unit analisisnya merupakan suatu organisasi sehingga data tersebut berasal dari suatu organisasi tertentu yaitu perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Menurut Pedoman Skripsi (2021:34) data kuantitatif adalah data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh penulis tidak secara

langsung, dalam hal ini data yang digunakan oleh penulis adalah laporan keuangan dari perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi. Data yang berupa laporan keuangan tersebut diperoleh atau bersumber dari website resmi perusahaan dan dari situs BEI www.idx.co.id.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah karakteristik dari objek amatan yang nilainya berbeda-beda. Kumpulan dari objek-objek pengamatan disebut populasi (Widodo dan Andawaningtyas, 2017).

Operasionalisasi variabel mendefinisikan kriteria yang dapat diobservasikan dari apa yang sedang didefinisikan untuk variabel bekerja, dan menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara besar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Independen (X)

Menurut Franciska (2017) Variable Bebas (*independent variabel*) merupakan variable yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variable terikat, atau yang memiliki hubungan positif atau negatif bagi variable terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi bebas adalah Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance*.

2) Variabel Dependent (Y)

Menurut Franciska (2017) Variabel Terikat (*dependent variable*) merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi terikat adalah *Tax Avoidance*.

Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI.

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Variabel Independen	Karakter Eksekutif	- <i>Earning Before Interest</i> - <i>Tax</i> - <i>Depreciation</i>	$Risk = \frac{\Delta Ebitda\ t-t_{-1}}{\Delta Total\ Aset\ Perusahaan\ t-t_{-1}}$	Rasio
	<i>Leverage</i>	Proporsi Hutang Jangka Panjang	$DAR = \frac{Total\ Hutang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Aset}$	Rasio
	<i>Corporate Governance</i>	Proporsi Komisaris Independen	$IND = \frac{\sum\ Komisaris\ Independen}{\sum\ Anggota\ Dewan\ Komisaris} \times 100\%$	Rasio
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>	Tarif Pajak Efektif Perusahaan	$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

3.5 Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel data dari perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode non-probabilitas yaitu *purposive sampling* atau hanya perusahaan sektor industri barang konsumsi tertentu yang memenuhi kriteria yang menjadi objek penelitian. Menurut Sugiyono populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Jadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sector industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Sampel penelitian ini ditarik menggunakan Teknik non-probabilitas atau dapat dikenal juga sebagai pengambilan sampel secara tidak acak mengambil sampel dalam suatu organisasi dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Beberapa kriteria yang diterapkan untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2015-2019.
- 2) Perusahaan Sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap dan data terpenuhi secara baik sesuai dengan komponen yang dibutuhkan pada periode penelitian 2015-2019.
- 3) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak memperoleh rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2015-2019.

Tabel 3.2 Daftar Populasi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

No	KODE	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
1	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓
2	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	✓	✓	✓	✓
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓
4	KLBF	PT. Kable Farma Tbk	✓	✓	✓	✓
5	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk	✓	✓	✓	✓
6	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk	✓	✓	✓	✓
7	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	✓	✓	✓	✓
8	SIDO	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	-	-	✓	-
9	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	✓	✓	✓	✓
10	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓
11	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk	✓	✓	✓	✓
12	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	-	-	✓	-
13	RMBA	PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	✓	-	-	-
14	INAF	PT. Indofarma Tbk	-	-	-	-
15	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	✓	✓	✓	✓
16	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk	-	-	-	-
17	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk	-	-	✓	-
18	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	✓	-	✓	-
19	SOHO	PT. Soho Global Health Tbk	-	-	-	-
20	WOOD	PT. Integra Indocabinet Tbk	✓	-	✓	-
21	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk	-	-	✓	-
22	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓
23	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	-	-	-	-
24	DVLA	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk	-	-	✓	-
25	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	✓	-	✓	-
26	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk	-	-	-	-
27	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk	✓	✓	-	-
28	VICI	PT. Victoria Care Indonesia	-	-	-	-
29	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk	-	-	✓	-
30	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur Tbk	-	-	✓	-
31	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	✓	✓	✓	✓
32	MERK	PT. Merck Tbk	✓	✓	✓	✓
33	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	✓	-	✓	-
34	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	✓	✓	✓	✓
35	PEHA	PT. Phapros Tbk	-	-	✓	-
36	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk	✓	✓	✓	✓

No	KODE	Nama Perusahaan	Kriteria			Memenuhi Kriteria
			1	2	3	
37	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk	-	-	✓	-
38	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk	✓	✓	-	-
39	CBMF	PT. Cahaya Bintang Medan Tbk	-	-	-	-
40	PMMP	PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk	-	-	-	-
41	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	✓	✓	✓	✓
42	ITIC	PT. Indonesia Tobacco Tbk	-	-	-	-
43	TOYS	PT. Sunindo Adipersada Tbk	-	-	-	-
44	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk	-	-	✓	-
45	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk	✓	✓	✓	✓
46	WMUU	PT. Widodo Makmur Unggas Tbk	-	-	-	-
47	PCAR	PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk	-	-	-	-
48	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk	-	-	-	-
49	CINT	PT. Chitose Internasional Tbk	✓	✓	✓	✓
50	SOFA	PT. Boston Furniture Industries Tbk	-	-	-	-
51	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk	-	-	-	-
52	LMPI	PT. Langgeng Makmur Industri Tbk	-	-	-	-
53	MBTO	PT. Martina Berto Tbk	✓	-	-	-
54	IKAN	PT. Era Mandiri Cermerlang Tbk	-	-	-	-
55	MRAT	PT. Mustika Ratu Tbk	-	-	✓	-
56	FOOD	PT. Sentra Food Indonesia Tbk	✓	-	✓	-
57	KICI	PT. Kedaung Indah Can Tbk	-	-	-	-
59	KPAS	PT. Cottonindo Ariesta Tbk	-	-	✓	-
60	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	-	-	-	-
61	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk	-	-	-	-
62	FLMC	PT. Falmaco Nonmoven Industri Tbk	-	-	-	-
63	MGLV	PT. Panca Anugrah Wisesa Tbk	-	-	-	-
64	STTP	PT. Siantar Top Tbk	✓	✓	✓	✓
65	MGNA	PT. Magna Investama Mandiri Tbk	-	-	-	-
66	IHKP	PT. Inti Agri Resources Tbk	✓	-	-	-
67	SCPI	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	✓	✓	✓	✓

Sumber; www.idx.co.id (2021)

Keterangan ✓ = Sesuai, dan - = Tidak Sesuai

Tabel 3, 3 Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
2	HMSF	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
3	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4	KLBF	PT. Kable Farma Tbk
5	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
6	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
7	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
8	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk
9	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
10	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk
11	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
12	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk
13	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
14	MERK	PT. Merck Tbk
15	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
16	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
17	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
18	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
19	CINT	PT. Chitose Internasional Tbk
20	STTP	PT. Siantar Top Tbk
21	SCPI	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk

Sumber: www.idx.co.id (2021)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mengunduh data berupa laporan keuangan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 dari situs www.idx.co.id dan *website* masing-masing perusahaan. Kemudian dalam pengumpulan data lainnya didapat dengan cara membaca buku-buku dan sumber yang relevan. Seperti akuntansi perpajakan, manajemen keuangan analisis laporan keuangan jurnal-jurnal terkait dan sebagainya sehingga dapat memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu merupakan pengujian hipotesis dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ini ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan periode 2015-2019.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Microsoft Office Excel* dan Software Statistik *Eviews 10* yang merupakan sebuah program pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan dan perhitungan sekunder untuk variabel independen akan diolah dan dihitung dengan *Microsoft Office Excel*. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang baik maka

perlu dilakukan beberapa uji asumsi klasik dengan menggunakan *eviews 10*, tetapi sebelumnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

3.7.2 Model Regresi Data Panel

Model regresi data panel merupakan model analisis yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time-series*) dan data deret lintang (*cross-section*). Ada dua macam panel yaitu data *balance* panel dan data *unbalance* panel, data *balance* panel adalah keadaan dimana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Sedangkan data *unbalance* panel adalah keadaan dimana unit *cross sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama. Pada penelitian ini menggunakan data panel *balance* panel.

Model regresi ini memiliki keunggulan karena memiliki parameter yang lebih banyak. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda dengan data panel. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross-section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time-series*).

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang akan dimasukkan kedalam persamaan model regresi yaitu Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance*. Sehingga persamaan model regresi panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Karakter Eksekutif

X_1 = Variabel Karakter Eksekutif

β_2 = Koefisien Regresi *Leverage*

X_2 = Variabel *Leverage*

β_3 = Koefisien Regresi *Corporate Governance*

X_3 = Variabel *Corporate Governance*

i = Entitas ke- i

t = Entitas ke- t

ε = *Error*

3.7.3 Kepemilikan Model Estimasi Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*, sedangkan menentukan metode mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini maka akan digunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman*: (Mahulete, 2016).

3.7.3.1 Model Pooled (*Common Effect*)

Common Effect merupakan pendekatan paling sederhana yang disebut estimasi CEM atau *Pooled Least Square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dengan berbagai kurun waktu.

Model ini hanya mengombinasikan data *time-series* dan *cross-section* dalam bentuk *pool*, mengestimasi nya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (*Pooled Least Square*). Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa nilai intersep masing-masing variabel adalah sama, begitu pula dengan *slope* koefisien untuk semua unit *cross-section* dan *time-series*. Berdasarkan asumsi ini maka model CEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan asumsi ini maka model CEM dinyatakan sebagai berikut: Dimana i menunjukkan *cross section* (individu) dan t menunjukkan periode waktu. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap uni *cross section* dapat dilakukan.

3.7.3.2 Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar-individu. Perbedaan tersebut dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effect*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan Teknik variabel *dummy*.

Salah satu cara dalam memperhatikan unit *cross-section* pada model regresi *section* tetapi masih mengasumsikan *slope* koefisien teta. Model FEM dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Selain dapat diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel *dummy* waktu didalam model.

3.7.3.3 Model Efek Acak (*Random Effect*)

Efek spesifik dari masing-masing individu diperlukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *Random Effect Model (REM)*.

Model ini sering disebut juga dengan *Error Component Model* (EDM). Pada Model REM, diasumsikan $\alpha_i = \alpha_0 + \varepsilon_i$ dengan ε_i merupakan *error random* yang mempunyai *mean* 0 dan *varians* $\sigma^2\varepsilon_i$, ε_i tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{it}^j ; \varepsilon_{it} = u_i + V_t + W_{it}$$

Dengan $w_{it} = \varepsilon_i + u_{it}$, suku *error* gabungan w_{it} memuat dua komponen *error* yaitu ε_i komponen *error cross section* dan u_{it} yang merupakan kombinasi komponen *error cross section* dan *time series*.

Metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *Generalized Least Squared* (GLS) dengan asumsi homokedastik dan tidak ada *crosssectional correlation*. Untuk menentukan estimasi yang digunakan, maka dilakukan Uji *Chow-Test* dan Uji *Hausman-Test*.

3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan uji data yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, dimana bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian (Gunawan, 2016). Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari:

3.7.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas digunakan untuk menyelidiki apakah data yang dikumpulkan mengikuti dugaan distribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas dapat dengan memakai uji sebagai berikut:

- 1) Kolmogorof-Smirnov, merupakan uji normalitas untuk sampel besar dan untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variable normal atau tidak. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $0,05 < \text{nilai signifikan}$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.
- 2) Pengujian normal probability plot menurut Ghozali (2016), yaitu sebagai berikut:
 - a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal yang mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal.
 - b) Jika data menyebar jauh dari diagonalnya dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

3.7.4.2 Uji multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya koreksi antar variabel bebas (*independent variable*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen. Untuk menguji data atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya, (2) *Variance Inflation*

Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable independen manakah yang dijelaskan oleh variable independen lainnya. Dalam pengertian ini sederhana setiap variable independen menjadi variable dependen daniregresi terhadap variable independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabelitas variable independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variable independent lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

Beberapa alternative cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengganti atau mengeluarkan variable yang mempunyai kolerasi yang tinggi.
- 2) Menambah jumlah observasi.
- 3) Mentransformasikkan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk *first differencedelta*.

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variable-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variable terkait.
2. Menganalisis matrik kolerasi variable-variabel bebas. Jika diantar variable ada kolerasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hak ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variable bebas tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedaritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka homoskedastisitas dan juga berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu secara teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

3.7.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menguji signifikannya. Untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variable dapat menggunakan uji statistic linear berganda. Uji signifikan variable independen dan variable dependen dengan uji statistic t (t-test) dan uji F (F-test).

Secara statistic, ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

1. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model pengaruh variable independen secara serentak terhadap variable dependen. Setiap tambahan satu variable independen, maka koefisien determinasi pasti mengikat tidak peduli apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Dengan maksud, semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar sumbangan pengaruh dari variable independent dalam menjelaskan variable dependen. (Ghozali, 2016).

Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variable independent menjelaskan variable dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1
- b) Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kesosokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- c) Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial biasanya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

1. Jika nilai t_{hitung} perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t_{tabel} , maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai t_{hitung} perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari nilai t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

- a) Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka karakter eksekutif secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka karakter eksekutif secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b) Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Jika nilai Sig. > 0,05 maka *leverage* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

- c) Jika nilai Sig. < 0,05 maka *corporate governance* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Jika nilai Sig. > 0,05 maka *corporate governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

- a. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Jika F_{hitung} yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari F_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

Berdasarkan tingkat signifikan:

- 1) Jika nilai Sig. < 0,05 maka karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Jika nilai Sig. > 0,05 maka karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Terdapat dua variable dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut, pertama adalah variable independent atau variabel bebas (variable X), yaitu Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance*, kedua adalah variable dependen atau variable terikat (variable Y), yaitu Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sector industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari pihak lain. Peneliti mendapatkan data dan informasi melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu, (www.idx.co.id), dan (www.idfinancials.com), berupa laporan keuangan perusahaan yang telah di audit selama lima periode yaitu 2015-2019, dan data nama perusahaan tergabung pada perusahaan sektor pertanian diperoleh dari (www.sahamok.com).

Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *purposive sampling* maka pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan hal-hal tertentu pada objek penelitian. Berikut ini merupakan kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan sector industry barang konsumsi yang dijadikan sampel sebagai berikut:

- 1) Perusahaan sector industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2015-2019.
- 2) Perusahaan Sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap dan data terpenuhi secara baik sesuai dengan komponen yang dibutuhkan pada periode penelitian 2015-2019.
- 3) Perusahaan sector industri barang konsumsi yang tidak memperoleh rugi sebelum pajak selama periode penelitian 2015-2019.

Berdasarkan pada kriteria kelengkapan data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka perusahaan sector industry barang konsumsi yang dijadikan sampel penelitian dan sesuai kriteria sebanyak 21 perusahaan.

Peneliti meneliti Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Jumlah data yang dikumpulkan dan digunakan sebanyak enam puluh tujuh. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan yang telah dikumpulkan oleh

peneliti berkaitan dengan karakter eksekutif, *leverage* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* sebagai berikut:

4.1.1 Karakter Eksekutif Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Berikut ini hasil perhitungan karakter eksekutif dengan menggunakan *risk* pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sebagai berikut:

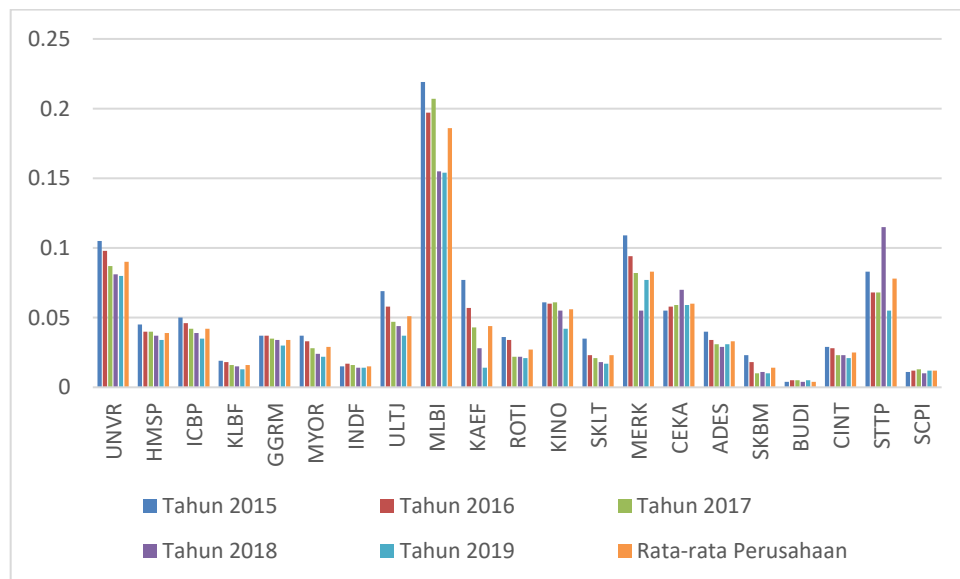
Tabel 4.1

Hasil perhitungan Karakter Eksekutif (*Risk*) Perusahaan Sektor Industri Barang Kosumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Kode Perusahaan	Tahun					Rata-rata Perusahaan
	2015	2016	2017	2018	2019	
UNVR	0,105	0,098	0,087	0,081	0,080	0,090
HMSP	0,045	0,040	0,040	0,037	0,034	0,039
ICBP	0,050	0,046	0,042	0,039	0,035	0,042
KLBF	0,019	0,018	0,016	0,015	0,013	0,016
GGRM	0,037	0,037	0,035	0,034	0,030	0,034
MYOR	0,037	0,033	0,028	0,024	0,022	0,029
INDF	0,015	0,017	0,016	0,014	0,014	0,015
ULTJ	0,069	0,058	0,047	0,044	0,037	0,051
MLBI	0,219	0,197	0,207	0,155	0,154	0,186
KAEF	0,077	0,057	0,043	0,028	0,014	0,044
ROTI	0,036	0,034	0,022	0,022	0,021	0,027
KINO	0,061	0,060	0,061	0,055	0,042	0,056
SKLT	0,035	0,023	0,021	0,018	0,017	0,023
MERK	0,109	0,094	0,082	0,055	0,077	0,083
CEKA	0,055	0,058	0,059	0,070	0,059	0,060
ADES	0,040	0,034	0,031	0,029	0,031	0,033
SKBM	0,023	0,018	0,010	0,011	0,010	0,014
BUDI	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,004
CINT	0,029	0,028	0,023	0,023	0,021	0,025
STTP	0,083	0,068	0,068	0,115	0,055	0,078
SCPI	0,011	0,012	0,013	0,010	0,012	0,012
Rata-rata Pertahun	0,055	0,049	0,046	0,042	0,037	0,046

(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Berikut disajikan Grafik Pergerakan Karakter Eksekutif pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.



(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Gambar 4.1

Pergerakan *Risk* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Berdasarkan table 4.1 dan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata *Risk* Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari dua puluh satu perusahaan, yaitu UNVR, HMSP, ICBP, KLBF, GGRM, MYOR, INDF, ULTJ, MLBI, KAEF, ROTI, KINO, SKLT, MERK, CEKA, ADES, SKBM, BUDI, CINT, STTP, dan SCPI. Fluktuasi *RISK* ini dikarenakan adanya peningkatan dan penurunan dalam kecenderungan karakter eksekutif. Nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar 0,046 atau sebesar 4,6% dimana perusahaan yang nilai resikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*. Sebaliknya perusahaan yang nilai resikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk aserve*.

Nilai *Risk* tertinggi dimiliki oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) yaitu sebesar 0,186. Hal ini disebabkan karena total laba sebelum pajak yang dimiliki oleh MLBI mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, yang artinya perusahaan termasuk dalam *Risk taker* sehingga dapat diartikan bahwa PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) dapat

meningkatkan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajaknya. Tetapi pada tahun 2018 dan 2019 nilai risk mereka menurun.

Sedangkan nilai rata-rata *Risk* terendah dimiliki oleh PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) sebesar 0,04 atau sebesar 4%. Hal ini perusahaan termasuk dalam *Risk Averse* yang artinya eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga dapat diartikan bahwa BUDI menurun dalam melakukan aktivitas penghindaran pajaknya.

Pada table 4.1 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa ada beberapa perusahaan yang nilai *Risk* nya cenderung mengalami penurunan disetiap tahunnya diantara lain yaitu PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), PT Kable Farma Tbk (KLBF), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Nippon Indosari Copindo Tbk (ROTI), PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dan PT Sekar Bumi Tbk (SKBM). Semakin rendah nilai *Risk* nya maka perusahaan termasuk dalam *Risk Averse* yang artinya eksekutif perusahaan cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

Kondisi *Risk* PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Kino Indonesia Tbk (KINO), PT Merck Tbk (MERK), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT Akasha Wira Internasional Tbk (ADES), PT Chitose Internasional Tbk (CINT), PT Siantar Top Tbk (STTP), dan PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) seperti yang terlihat pada table 4.1 dan gambar 4.1 menunjukkan bahwa *risk* cenderung mengalami fluktuatif yang berarti ada kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.

4.1.2 Leverage Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Berikut ini hasil perhitungan *Leverage* dengan menggunakan DAR pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sebagai berikut:

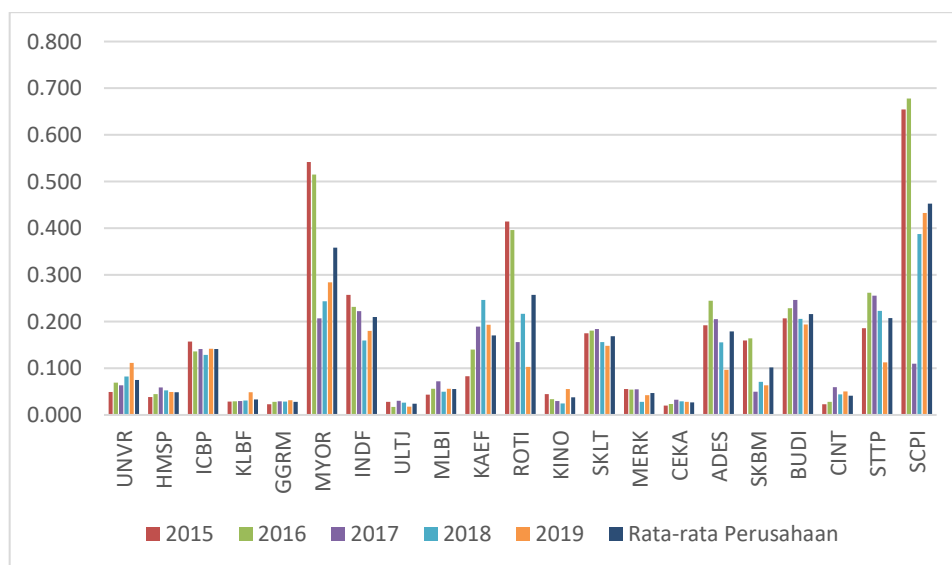
Tabel 4.2

Hasil perhitungan *Leverage* (DAR) Perusahaan Sektor Industri Barang Kosumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Kode Perusahaan	Tahun					Rata-rata Perusahaan
	2015	2016	2017	2018	2019	
UNVR	0,049	0,069	0,064	0,082	0,111	0,075
HMSP	0,038	0,045	0,059	0,053	0,049	0,049
ICBP	0,157	0,136	0,141	0,129	0,142	0,141
KLBF	0,029	0,029	0,03	0,031	0,048	0,033
GGRM	0,023	0,028	0,029	0,028	0,031	0,028
MYOR	0,542	0,515	0,207	0,244	0,284	0,358
INDF	0,257	0,231	0,222	0,16	0,18	0,21
ULTJ	0,028	0,017	0,03	0,026	0,018	0,024
MLBI	0,043	0,056	0,072	0,05	0,56	0,055
KAEF	0,083	0,14	0,189	0,246	0,193	0,17
ROTI	0,415	0,396	0,156	0,217	0,103	0,257
KINO	0,045	0,034	0,03	0,025	0,055	0,038
SKLT	0,175	0,181	0,184	0,156	0,148	0,169
MERK	0,056	0,055	0,055	0,028	0,042	0,047
CEKA	0,02	0,024	0,032	0,029	0,028	0,027
ADES	0,192	0,244	0,205	0,155	0,096	0,179
SKBM	0,16	0,164	0,05	0,071	0,064	0,102
BUDI	0,207	0,228	0,247	0,206	0,194	0,216
CINT	0,023	0,028	0,059	0,044	0,051	0,041
STTP	0,186	0,262	0,256	0,223	0,113	0,208
SCPI	0,655	0,678	0,11	0,388	0,432	0,452
Rata-rata Pertahun	0,161	0,17	0,116	0,123	0,116	0,137

(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Leverage* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.



(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Gambar 4.2

Pergerakan *Leverage* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Berdasarkan table 4.2 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata *leverage* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari dua puluh satu perusahaan. Nilai rata-rata *Leverage* seluruh perusahaan adalah sebesar 0.137 atau 137%, perusahaan yang memiliki nilai rata-rata *leverage* paling rendah adalah PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ). Rata-rata *leverage* ULTJ sebesar 0.024 artinya perusahaan menunjukkan banyaknya hutang yang dimiliki dalam melakukan pembiayaan serta banyaknya aktiva yang dibiayai hutang sebesar 2.4%. sehingga perusahaan kurang efisien dalam mengurangi beban pajak karena untuk mengurangi laba dari beban bunga yang dihasilkan oleh hutang untuk memperoleh asset hanya sebesar 2.4%.

Selain itu nilai rata-rata *leverage* yang paling tinggi adalah PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) sebesar 0.452 atau 45,2% pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan hutang yang dapat mengurangi beban bunga dari laba yang dihasilkan dengan begitu perusahaan memiliki beban pajak yang lebih kecil.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai *leverage* paling tinggi dimiliki oleh PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) sebesar 65,4%, 67,7%, 10,9%, 38,7%, dan 43,2%. Sedangkan yang memiliki nilai biaya operasional paling rendah pada tahun 2015-2019 adalah PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) yaitu sebesar 2,7%, 1,6%, 3,0%, 2,6% dan 1,7%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *leverage* tertinggi pada dua puluh satu perusahaan selama lima tahun adalah perusahaan SCPI dan untuk nilai terendah dimiliki oleh perusahaan ULTJ. Lalu perusahaan dengan nilai *leverage* rendah setelah ULTJ adalah perusahaan CEKA, GGRM dan KLBF.

4.1.3 Corporate Governance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Berikut ini hasil perhitungan *Corporate Governance* dengan menggunakan Komisariss Independen pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sebagai berikut:

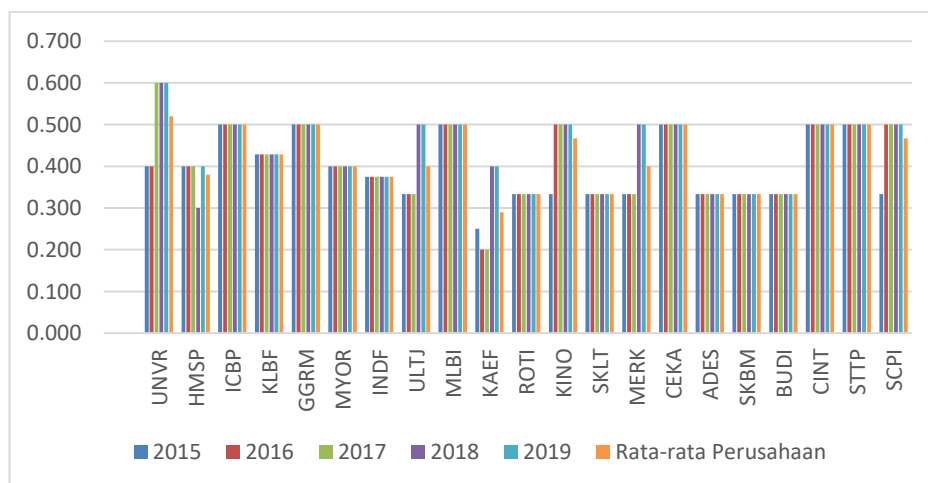
Tabel 4.3

Hasil perhitungan *Corporate Governance* (Komisaris Independen) Perusahaan Sektor Industri Barang Kosumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Kode Perusahaan	Tahun					Rata-rata Perusahaan
	2015	2016	2017	2018	2019	
UNVR	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,52
HMSP	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,38
ICBP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
KLBF	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429
GGRM	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
MYOR	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
INDF	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
ULTJ	0,333	0,333	0,5	0,5	0,5	0,4
MLBI	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,375
KAEF	0,25	0,2	0,4	0,4	0,4	0,29
ROTI	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
KINO	0,333	0,5	0,5	0,5	0,5	0,467
SKLT	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
MERK	0,333	0,333	0,333	0,5	0,5	0,4
CEKA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
ADES	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
SKBM	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
BUDI	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
CINT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
STTP	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
SCPI	0,333	0,5	0,5	0,5	0,5	0,467
Rata-rata Tahun	0,393	0,407	0,416	0,441	0,116	0,419

(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Corporate Governance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.



(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Gambar 4.3

Pergerakan *Coorporate Governance* Pada Perusahaan Sektor Industri
Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Berdasarkan table 4.3 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata *coorporate governance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 hampir disetiap tahunnya jumlah komisaris independent pada setiap perusahaan mengalami kesamaan, nilai rata-rata proporsi komisaris independen pada seluruh perusahaan adalah 0,419. Nilai rata-rata paling rendah dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) sebesar 0,290 yang berarti jika semakin rendah jumlah dewan komisaris maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah pula. Kemudian nilai rata-rata proporsi komisaris independent yang paling tinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar 0,520 yang artinya jika semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka kinerja dan aktivitas pengawasan yang dapat dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak semakin tinggi.

Pada tahun 2015-2019 nilai rata-rata proporsi komisaris independent yang paling tinggi dimiliki oleh PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yaitu sebesar 0,400, 0,400, 0,600, 0,600 dan 0,600. Nilai rata-rata proporsi komisaris independent yang paling rendah pada tahun 2015-2019 dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yaitu sebesar 0,250, 0,200, 0,200, 0,400 dan 0,400.

Dapat disimpulkan bahwa pada dua puluh satu perusahaan periode lima tahun nilai rata-rata proporsi komisaris independent yang paling tinggi dimiliki oleh UNVR, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan KAEF. Proporsi Komisaris Independent yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengawasan komisaris yang tinggi sehingga pajak yang akan dibayarkan pun berkurang, proporsi komisaris independent yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang memiliki pengawasan dalam kinerja perusahaan maka pajak yang akan dibayarkan pun juga tinggi. Lalu nilai rata-rata terendah setelah KAEF adalah SKBM, ADES, SKLT, BUDI dan ROTI.

4.1.4 Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2019

Berikut ini hasil perhitungan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019, sebagai berikut:

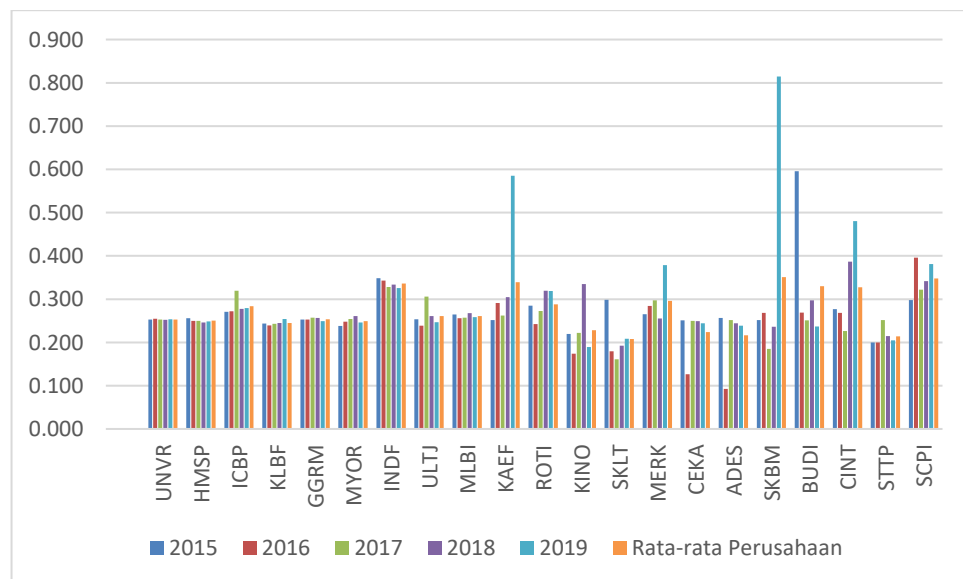
Tabel 4.4

Hasil perhitungan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Industri Barang Kosumsi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Kode Perusahaan	Tahun					Rata-rata Perusahaan
	2015	2016	2017	2018	2019	
UNVR	0,253	0,254	0,253	0,252	0,253	0,253
HMSP	0,256	0,25	0,25	0,246	0,249	0,25
ICBP	0,271	0,272	0,319	0,277	0,279	0,284
KLBF	0,244	0,239	0,243	0,245	0,254	0,245
GGRM	0,253	0,253	0,257	0,256	0,249	0,254
MYOR	0,238	0,248	0,254	0,261	0,246	0,249
INDF	0,349	0,343	0,328	0,334	0,325	0,336
ULTJ	0,253	0,239	0,306	0,261	0,247	0,261
MLBI	0,264	0,256	0,257	0,267	0,259	0,261
KAEF	0,252	0,291	0,262	0,305	0,585	0,339
ROTI	0,285	0,243	0,273	0,32	0,319	0,288
KINO	0,219	0,174	0,222	0,335	0,189	0,228
SKLT	0,299	0,18	0,161	0,192	0,208	0,208
MERK	0,265	0,284	0,297	0,256	0,378	0,296
CEKA	0,251	0,126	0,25	0,249	0,244	0,224
ADES	0,257	0,092	0,252	0,244	0,239	0,217
SKBM	0,251	0,268	0,185	0,236	0,815	0,351
BUDI	0,596	0,269	0,251	0,297	0,237	0,33
CINT	0,277	0,268	0,226	0,386	0,48	0,328
STTP	0,2	0,2	0,251	0,214	0,205	0,214
SCPI	0,298	0,396	0,322	0,342	0,381	0,348
Rata-rata Tahunan	0,278	0,245	0,258	0,275	0,316	0,274

(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Berikut disajikan Grafik Pergerakan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.



(Sumber: www.idnfinancials.com data diolah 2023)

Gambar 4.4

Pergerakan *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019

Berdasarkan table 4.4 dan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata *tax avoidance* pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari dua puluh satu perusahaan. Nilai rata-rata seluruh perusahaan adalah sebesar 0,274 atau 27,4%. Perusahaan yang memiliki nilai rata-rata penghindaran pajak paling rendah adalah PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Nilai rata-rata penghindaran pajak SKLT sebesar 0,208 atau 20,8%. Perusahaan dengan nilai rata-rata penghindaran pajak tertinggi dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yaitu sebesar 0.351 atau 35,1%.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 nilai penghindaran pajak yang paling tinggi dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) yaitu sebesar 25,1%, 26,8%, 18,5%, 23,6% dan 81,5%. Nilai penghindaran pajak yang paling rendah pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dimiliki oleh PT Sekar Laut Tbk (SKLT) yaitu sebesar 29,9%, 18%, 16,1%, 19,2% dan 20,8%.

Dapat disimpulkan bahwa pada dua puluh satu perusahaan periode lima tahun nilai rata-rata penghindaran pajak yang paling tinggi dimiliki oleh SKBM, sedangkan nilai terendah dimiliki oleh perusahaan SKLT. Lalu nilai rata-rata terendah setelahnya yaitu STTP dengan nilai rata-rata 21,4%, ADES dengan nilai rata-rata 21,7%, kemudian KINO dengan nilai rata-rata 22,8%.

4.2 Analisis Data

Pengujian mengenai penelitian “Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019” dilakukan dengan pengujian statistic. Penelitian ini menggunakan software E-Views 10. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dan analisis regresi data panel.

Beberapa pengujian dilakukan Uji kesesuaian model (Uji Chow dan Uji Hausman) Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokolerasi, Uji Hipotesis (Uji t atau koefisien secara parsial, Uji F atau koefisien secara bersama-sama, dan Uji koefisien Determinasi).

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel independent yaitu Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance*, sedangkan variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif statistik:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Karakter Eksekutif	Leverage	Corporate Governance	Tax Avoidance
Mean	0.045858	0.137140	0.411484	0.274408
Median	0.034970	0.083175	0.400000	0.254222
Maximum	0.218921	0.677920	0.600000	0.814617
Minimum	0.003984	0.016981	0.200000	0.092235
Std. Dev.	0.040781	0.133457	0.086266	0.087506
Skewness	2.212561	1.899416	0.053518	3.171438
Kurtosis	8.737715	7.151747	2.170840	18.20817
Jarque-Bera	229.7009	138.5481	3.057965	1187.902
Probability	0.000000	0.000000	0.216756	0.000000
Sum	4.815039	14.39966	43.20582	28.81285
Sum Sq. Dev.	0.172957	1.852311	0.773948	0.796353
Observations	105	105	105	105

(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 sampel dengan pemilihan periode 5 tahun maka memperoleh $n = 105$. Diketahui bahwa variabel Karakter Eksekutif (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,045, nilai standar deviasi sebesar 0,040, nilai maximum sebesar 0,218, nilai minimum sebesar 0,003 dengan nilai sum sebesar 4,815. Nilai skewness dan kurtosis sebesar 2,212 dan 8,737. Pada variabel *Leverage* (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,137, nilai standar deviasi sebesar 0,133, nilai maximum sebesar 0,677 dan minimum sebesar 0,016 dengan nilai sum sebesar 14,399. Nilai skewness dan kurtosis sebesar 1,899 dan 7,151. Pada variabel *Corporate Governance* (X_3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,411, nilai standar deviasi sebesar 0,086, nilai maximum sebesar 0,600 dan minimum sebesar 0,200 dengan nilai sum sebesar 43,205. Nilai skewness dan kurtosis sebesar 0,053 dan 2,170. Pada *Tax Avoidance* (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.2744, nilai standar deviasi sebesar 0,087 nilai maximum sebesar 0.814, nilai minimum sebesar 0.092 dengan nilai sum sebesar 28,812. Nilai skewness dan kurtosis sebesar 0,053 dan 2,170.

4.2.2 Pemilihan Model

Untuk memilih model manakah yang tepat untuk penelitian ini, maka dilakukan tesik estimasi data panel yaitu model *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk menentukan model yang tepat untuk pengujian penelitian ini terdapat beberapa pengujian model yang dapat dilakukan yaitu uji chow, uji hausman, uji lagrange multiplier (LM).

1. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang tepa tantara model *common effect* dengan model *fixed effect*. dengan hipotesis dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Common Effect Model*

H_2 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai probabilitas untuk *cross section* $F > 0,05$ maka terima H_0 yaitu model *Common Effect*, tetapi jika nilai probabiitas *cross section* $F < 0,05$ maka tolak H_0 , sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Berikut hasil Uji Chow:

Tabel 4.6
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	54.078747	(20,81)	0.0000
Cross-section Chi-square	279.714062	20	0.0000

(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukan bahwa nilai probabilitas untuk *cross section* $F < 0,05$ yaitu sebesar 0,0000. Sehingga untuk uji chow yang terpilih adalah *fixed effect* yang tepat digunakan dibandingkan dengan *common effect*. Selanjutnya dilakukan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model yang tepat antara model *Fixed Effect* dengan model *Random Effect*. Dengan hipotesis dalam uji chow yaitu:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai probabilitas pada *cross section random* $> 0,05$ maka terima H_0 yaitu model *Random Effect*, tetapi jika nilai probabilitas pada *cross section random* $< 0,05$ maka tolak H_0 , sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Berikut hasil Uji Hausman:

Tabel 4.7
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.720502	3	0.0033

(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan nilai probabilitas pada *cross section random* < 0,05 yaitu sebesar 0,0033 yang artinya menolak H_0 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam uji ini adalah model *Fixed Effect*.

Untuk menentukan model mana yang tepat untuk penelitian ini, berikut tabel kesimpulan atas hasil uji model data panel:

Tabel 4.8
Hasil Uji Model Data Panel

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	H_0 : <i>Common Effect Model</i> H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2	Uji Hausman	H_0 : <i>Random Effect Model</i> H_1 : <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
Kesimpulan		<i>Fixed Effect Model</i>	

(Sumber: Data diolah, 2023)

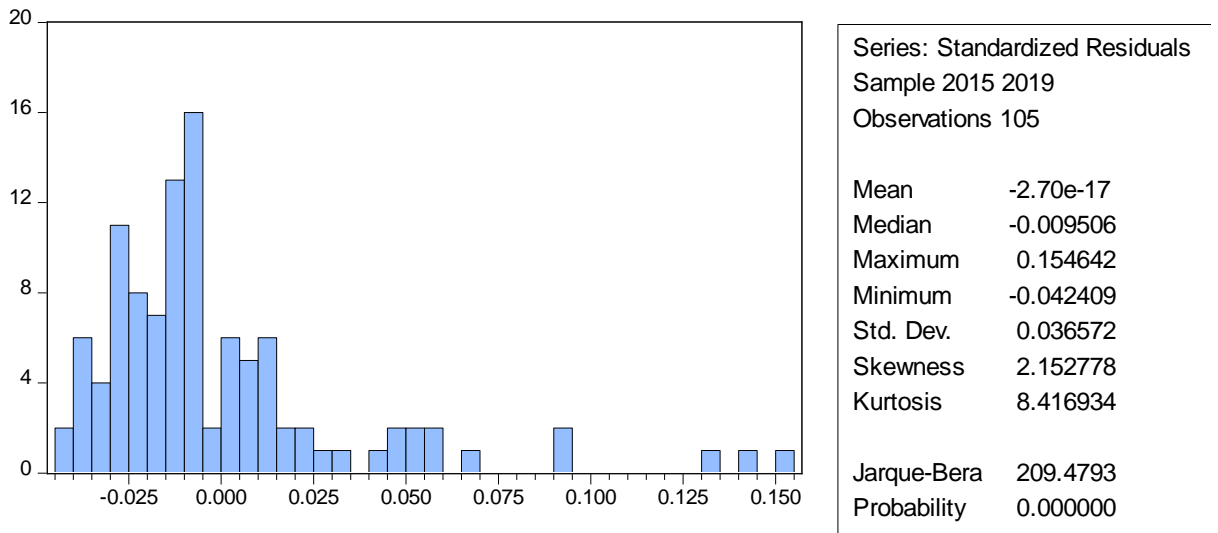
4.2.3 Transformasi Data

Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis ragam. Pada penelitian ini menggunakan transformasi data jenis transformasi logaritma. Transformasi data pada penelitian ini bertujuan untuk memenuhi asumsi klasik. Transformasi logaritma dilakukan dengan cara melogartimakan Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* sebagai variabel independent sedangkan variabel *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel tidak bebas atau keduanya distribusi normal atau tidak. Jika probabilitas lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal. Adapun pengolahan uji normalitas sebagai berikut:



(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Gambar 4.5 Uji Normalitas

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa nilai probability Jarque berra sebsar $209,4793 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal.

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel *independen*. Jika angka koefisien kolerasi dibawah 0,8 artinya tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali dan Ratmono, 2017). Adapun hasil pengolahan uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

	Karakter Eksekutif	Leverage	Corporate Governance
Karakter Eksekutif	1	-0.2918657460785774	0.3876461326635661
Leverage	-0.2918657460785774	1	-0.3538628054330516
Corporate Governance	0.3876461326635661	-0.3538628054330516	1

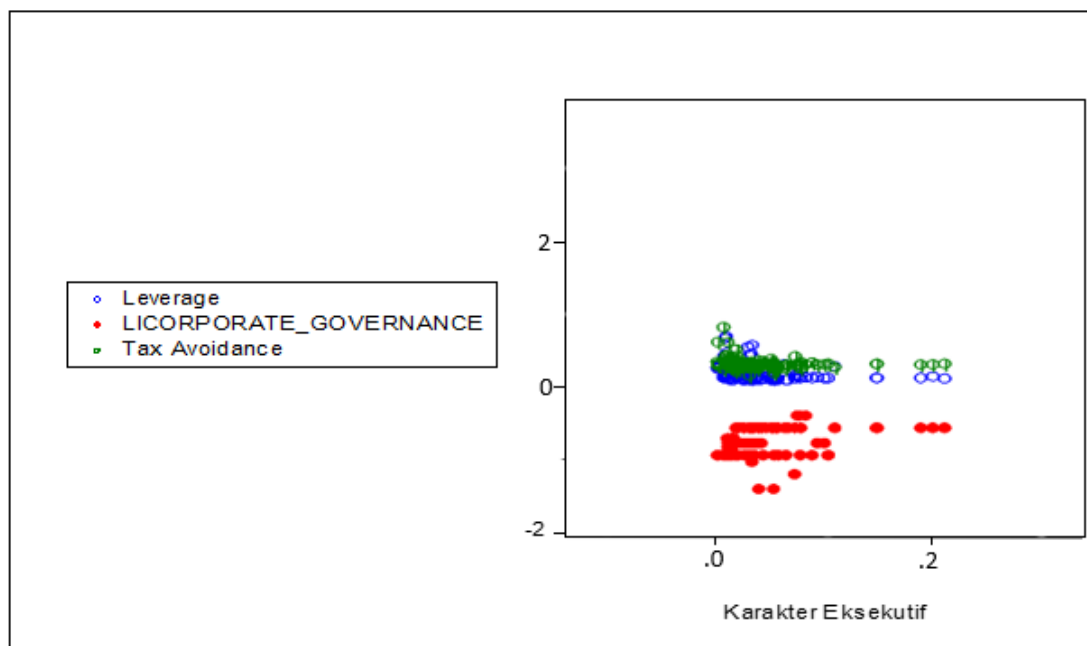
(Sumber: Data diolah menggunakan Eview 10, 2023)

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independent yang menghasilkan koefisien kolerasi yang nilainya <0.8 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas

Suatu model regresi dikatakan terkena heterokedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual sautu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut heterokedastisitas.

Pada penelitian ini dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji gleser. Jika nilai probabilitas pada seluruh variabel independent lebih dari 5% maka model tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil pengolahan uji heterokedastisitas sebagai berikut:



(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Gambar 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019

Berdasarkan Gambar 4.6 Menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.5 Analisis Regresi Data Panel

Model regresi data panel merupakan model analisis yang menggunakan data gabungan antara data time series dan data *cross section*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap banyak individu, sedangkan *time series* data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Model regresi ini dipilih oleh beberapa penulis untuk mendukung penelitian yang datanya terbatas. Selain itu model ini memiliki keunggulan karena memiliki parameter yang lebih banyak. Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda dengan data panel. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*).

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yang akan dimasukkan kedalam persamaan model regresi yaitu Rasio Likuiditas dan Biaya Operasional. Berikut adalah hasil uji regresi data panel menggunakan metode *Fixed Effect*:

Tabel 4.10

Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE

Method: Panel Least Squares

Date: 01/22/23 Time: 09:08

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 21

Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KARAKTER_EKSEKUTIF	0.009507	0.024340	0.390603	0.6969
LEVERAGE	-0.050472	0.029249	-1.725608	0.0375
CORPORATE_GOVERNANCE	0.147501	0.045287	3.257072	0.0015
C	0.257888	0.108896	2.368194	0.0203
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.195771	Mean dependent var	0.045858
Adjusted R-squared	0.171883	S.D. dependent var	0.040781
S.E. of regression	0.037111	Akaike info criterion	-3.712474
Sum squared resid	0.139097	Schwarz criterion	-3.611370
Log likelihood	198.9049	Hannan-Quinn criter.	-3.671504
F-statistic	8.195368	Durbin-Watson stat	0.237496
Prob(F-statistic)	0.000062		

(Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, 2023)

Dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom *Coefficient*. Adapun hasil pengolahan data panel dengan menggunakan metode model *Fixed Effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Tax Avoidance} = 0.257888 + 0.009507 - 0.050472 + 0.147501 + \text{error}$$

berikut penjelasan hasil persamaan regresi data panel:

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar 0,257888 artinya apabila Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* bernilai 0, maka *Tax Avoidance* memiliki nilai sebesar 0,257888.
- 2) Nilai koefisien regresi Karakter Eksekutif yaitu sebesar 0.009507, artinya setiap penurunan sebesar satu satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.009507 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi *Leverage* yaitu sebesar -0.050472, artinya setiap penurunan sebesar satu satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.050472 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi *Corporate Governance* yaitu sebesar 0.147501, artinya setiap penurunan sebesar satu satuan, maka *Tax Avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.147501 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

4.2.6 Pengujian Hipotesis

4.2.6.1 Uji t (Parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel *independen* berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel *dependen*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

A. Pengaruh Karakter Eksekutif (X_1) Terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Berdasarkan Tabel 4.10 Diketahui bahwa Karakter Eksekutif memiliki nilai signifikan sebesar 0,6969 lebih besar dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,6969 > 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar 0,390603 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$) atau ($0,390603 < 1,98373$). Oleh karena itu variabel Karakter Eksekutif tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

B. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4.10 Diketahui bahwa *Leverage* (X_2) memiliki nilai signifikan sebesar 0,0375 lebih besar dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,0375 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar -1,725608 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$) atau ($-1,725608 < 1,98373$). Oleh karena itu variabel *Leverage* memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

C. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4.10 Diketahui bahwa *Corporate Governance* (X_3) memiliki nilai signifikan sebesar 0,0015 lebih besar dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,0015 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar 0,676505 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$) atau ($3,257072 > 1,98373$). Oleh karena itu variabel *Corporate Governance* memiliki pengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

4.2.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas $\text{sig} < 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Sesuai dengan pengujian statistik uji f, jika tingkat $\text{sig} 0,05$ dengan df 1 adalah jumlah variabel dikurangi satu ($4-1 = 3$), dan df 2 adalah jumlah sampel dikurangi variabel independen dikurangi satu ($n-k-1$) atau $105 - 4 - 1 = 100$). Maka diperoleh hasil untuk F_{hitung} sebesar 1,552860 dan F_{tabel} sebesar 2,70. Jadi $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ ($1,552860 < 2,70$) dan memiliki probabilitas sebesar 0,077308 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Corporate Governance* secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4.2.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

1) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai ini semakin besar mendekati 1 maka kecocokan model regresi

semakin benar, sebaliknya jika nilai mendekati 0 maka model regresi semakin tidak layak. Berdasarkan Tabel 4.10 Dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.195771, hasil ini menunjukkan bahwa variasi dari *Tax Avoidance* dapat diterangkan oleh variabel Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Corporate Governance* sebesar 0.195771 atau sebesar 19,5771%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

2) *Adjusted R Square*

Adjusted R Square merupakan nilai R^2 yang disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam persamaan regresi dan ukuran sampel. Berdasarkan Tabel 4.10 Diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0.171883, hasil ini menunjukkan kontribusi pengaruh semua variabel independen Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap variabel *Tax Avoidance* adalah sebesar 0.171883 atau 17.1883%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. *Adjusted R Square* digunakan dalam penelitian yang digunakan lebih dari satu variabel.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Karakter Eksekutif (X_1) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* (X_2) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan *Corporate Governance* (X_3) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 4.11

Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
H ₁	X_1 berpengaruh positif terhadap Y	X_1 berpengaruh negatif terhadap Y	Ditolak
H ₂	X_2 berpengaruh positif terhadap Y	X_2 berpengaruh positif terhadap Y	Diterima
H ₃	X_3 berpengaruh positif terhadap Y	X_3 berpengaruh positif terhadap Y	Diterima
H ₄	X_1, X_2 dan X_3 secara simultan berpengaruh positif terhadap Y	X_1, X_2 dan X_3 berpengaruh positif secara simultan terhadap Y	Diterima

4.3.1 Pengaruh Karakter Eksekutif yang diprosikan dengan *Risk* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian secara parsial Karakter Eksekutif pada penelitian ini diprosikan menggunakan *Risk* menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana hasil pengujian statistik yang Diketahui bahwa Karakter Eksekutif (*Risk*) memiliki nilai signifikan sebesar 0,6969 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,6969 > 0,05$). Serta dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar 0,390603 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$)

atau ($0,390603 < 1,98373$) artinya Karakter Eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* artinya H_1 ditolak.

Berikut tabel rata-rata Perbandingan Karakter Eksekutif dengan *Tax Avoidance* pada Perusahaan sektor industri barang konsumsi periode 2015-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 4.12
Rata-rata Karakter Eksekutif dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019.

Rata-rata Karakter Eksekutif dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI					
	2015	2016	2017	2018	2019
Karakter Eksekutif	5,5%	4,9%	4,6%	4,2%	3,7%
<i>Tax Avoidance</i>	27,8%	24,5%	25,8%	27,5%	31,6%

Pada tabel diatas diindikasikan bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi tidak memanfaatkan dalam pengambilan keputusan pada manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena hal ini dibuktikan pada tahun 2015 nilai karakter eskekutif (*risk*) sebesar 5,5% sedangkan *tax avoidance* 27,8%, tahun 2016 nilai *Risk* sebesar 4,9% sedangkan *tax avoidance* sebesar 24,5%, tahun 2017 nilai *risk* 4,6% sedangkan *tax avoidance* 25,8%, tahun 2018 nilai *risk* sebesar 4.2% dan *tax avoidance* 27,5%. Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastic untuk *risk* sebesar 3.7% sedangkan nilai *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 31,6%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Karakter eskekutif terindikasi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Karakter terdapat 2 sifat yakni *risk taker* semakin berperan di dalam perusahaan, yang artinya jika eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi aktivitas tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Begitu pula sebaliknya jika tingkat risiko perusahaan semakin rendah maka eksekutif perusahaan bersifat *risk averse* yang mencerminkan berkurangnya aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *risk* yang diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak. Karakter eksekutif yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dalam keadaan *risk taker* dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menghindari beban pajak dengan baik.

Hasil dari analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dan dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Khoirunisa Alviyani (2016), Adelia Ratnasari (2016), Cahyani Dewi Handayani (2015) serta Zulfandi, Dudi & Indra Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3.2 Pengaruh *Leverage* yang diproksikan dengan *DAR* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian secara parsial *leverage* pada penelitian ini diproksikan menggunakan *DAR* menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistic pada uji t dimana hasil pengujian statistik dimana *leverage* memiliki nilai signifikan sebesar 0.0375 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,0375 < 0,05$). Hasil ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar -1,725608 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau ($-1,725608 < 1,98373$). Oleh karena itu variabel *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 4.13

Rata-rata *Leverage* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019.

Rata-rata <i>Leverage</i> dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI					
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Leverage</i>	16,1%	17%	11,6%	12,3%	11,6%
<i>Tax Avoidance</i>	27,8%	24,5%	25,8%	27,5%	31,6%

Pada tabel diatas diindikasikan bahwa perusahaan sektor industry barang konsumsi mengurangi beban pajak memanfaatkan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan karena hal ini dibuktikan pada tahun 2015 nilai *Leverage* sebesar 16,1% sedangkan *tax avoidance* 27,8%, tahun 2016 nilai *Leverage* sebesar 17% sedangkan *tax avoidance* sebesar 24,5%, tahun 2017 nilai *Leverage* 11,6% sedangkan *tax avoidance* 25,8%, tahun 2018 nilai *Leverage* meningkat sebesar 12,3% sedangkan *tax avoidance* meningkat menjadi 27,5%. Tahun 2019 mengalami penurunan untuk *Leverage* sebesar 11,6% sedangkan nilai *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 31,6%.

Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Alan tetapi utang akan menimbulkan beban tetap yang biasa disebut sebagai bunga. Dengan beban bunga tersebut perusahaan sektor industry barang konsumsi dapat memanfaatkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan dengan menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai *leverage* berarti semakin tinggi juga beban bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang semakin tinggi akan mengurangi beban pajak pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *leverage* yang diperoleh perusahaan berpengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak. *Leverage* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat melakukan pembiayaan asset dengan hutang sehingga dapat menghindari beban pajak yang tinggi.

Hasil dari analisis ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dan dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rully Gratika & Indra Wijaya (2018), Zulfandi dkk (2017) dan Khoirunisa Alviyani (2016) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian Widia Kurnia Sari (2019), Franciska Marintan Napitupulu (2017), Adelia Ratna Sari (2016), Cristine Meidalina, Ketut Sunarta dan Haqi Fadhilah (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3.3 Pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian secara pasrial *corporate governance* pada penelitian ini diproksikan menggunakan komisaris independen menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistic pada uji t dimana hasil pengujian statistik dimana *corporate governance* memiliki nilai signifikan sebesar 0.0015 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,0015 < 0,05$) yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana nilai t_{hitung} sebesar 3,257072 dan t_{tabel} 1,98373 maka ($t_{hitung} < t_{tabel}$) atau ($3,257072 > 1,98373$).

Tabel 4.14

Rata-rata *Corporate Governance* dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019.

Rata-rata <i>Corporate Governace</i> dan <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI					
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Corporate Governance</i>	39,3%	40,7%	41,6%	43,7%	44,1%
<i>Tax Avoidance</i>	27,8%	24,5%	25,8%	27,5%	31,6%

Pada tabel diatas diindikasikan bahwa perusahaan sektor industry barang konsumsi mengurangi beban pajak memanfaatkan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan karena hal ini dibuktikan pada tahun 2015 nilai *Corporate Governance* (IND) sebesar 39,3% sedangkan *tax avoidance* 27,8%, tahun 2016 nilai *Corporate Governance* (IND) sebesar 40,7% sedangkan *tax avoidance* sebesar 24,5%, tahun 2017 nilai *Corporate Governance* (IND) 41,6% sedangkan *tax avoidance* 25,8%, tahun 2018 nilai *Corporate Governance* (IND) meningkat sebesar 43,7% sedangkan *tax avoidance* meningkat menjadi 27,5%. Tahun 2019 mengalami peningkatan untuk *Corporate Governance* (IND) sebesar 44,1% sedangkan nilai *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 31,6%.

Proporsi Komisaris Independen yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengawasan komisaris yang tinggi sehingga pajak yang akan

dibayarkan pun berkurang, begitupula proporsi komisaris independent yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang memiliki pengawasan dalam kinerja perusahaan maka pajak yang akan dibayarkan pun juga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya *corporate governance* yang diperoleh perusahaan berpengaruh terhadap besar kecilnya penghindaran pajak.

Hasil dari analisis ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan dan dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima, penelitian ini mendukung penelitian Khoirunisa Alvyani (2016), Uun dan Puput (2016) dan Melia Sari & Hedy Paramitha Dewi (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Cahyani Dewi Handayani (2015) dan Cristine Meidalina, Ketut Sunarta dan Haqi Fadhillah (2019) bahwa *corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3.4 Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Berdasarkan hasil uji f dapatkan hasil untuk pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate governance* terhadap *tax avoidance* untuk nilai sig = 1.552860 < 0,05, artinya Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* didalam perusahaan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate governance* bertujuan untuk menekan serendah mungkin beban pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan yang harus membayar pajak tidak merasa terbebani dan perusahaan dapat melakukan manajemen pajak secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah yang ada dalam Undang-Undang perpajakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Karakter Eksekutif (*Risk*) berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini disebabkan karena presentase *risk* rendah dan dibawah 0 maka dapat diartikan bahwa perusahaan sektor industri barang konsumsi sedang bersifat *Risk Averse* tidak mendominasi *tax avoidance* perusahaan sektor tersebut. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan H_1 yang menyatakan bahwa Karakter Eksekutif (*Risk*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_1 ditolak.
2. Secara parsial *Leverage* (DAR) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini disebabkan karena presentase *Leverage* bukan pengurang dalam pembayaran beban pajak sehingga dapat menjadi penentu besar kecilnya pembayaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* atau H_2 diterima.
3. Secara parsial *Corporate Governance* (IND) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hal ini disebabkan karena presentase kinerja Komisaris Independen memang bukan pengurang dalam beban pajak perusahaan sehingga dapat menjadi penentu dalam besar kecilnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan H_3 yang mengatakan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau H_3 diterima.
4. Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* berpengaruh positif secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Hasil koefisien determinasi (R^2) Menunjukkan nilai adalah sebesar 0.306006. Hasil ini menyatakan bahwa variasi dari *Tax Avoidance* dapat diterangkan oleh variabel Karakter Eksekutif, *Leverage*, dan *Corporate Governance* sebesar 0.306006 atau sebesar 30,6006%, sedangkan sisanya sebesar 0.693994 atau sebesar 69,3994% dipengaruhi oleh variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan Pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage* dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019, maka peneliti memberikan saran guna meningkatkan kualifikasi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebelum memberikan investasi pada perusahaan. Karena jika *Risk* yang terlalu rendah berarti suatu perusahaan tersebut memiliki sifat *risk averse* dimana eksekutif perusahaan kurang berani dalam mengambil keputusan. Sedangkan jika *leverage* terlalu tinggi juga dapat diartikan perusahaan melakukan hal yang optimal dalam memutar pendapatan aset dengan menggunakan hutang. Selain itu juga Proporsi Komisaris independen yang terlalu banyak dapat mengoptimalkan kinerja dalam pengawasan perusahaan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk membantu investor dalam memecahkan serta mengantisipasi masalah sebelum mengambil keputusan bisnis.

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penghindaran pajak, seperti menggunakan sektor lain selain sektor industri barang konsumsi sebagai lokasi penelitian, rentang waktu penelitian diperpanjang selain itu agar peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain selain karakter eksekutif (*risk*), *leverage*, dan *corporate governance* untuk membandingkan variabel mana yang lebih mempengaruhi pajak penghasilan badan untuk memberikan hasil yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syaifullah, (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Industry Barang Konsumsi fi Bursa Efek Indonesia). Skripsi-S1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5916/> [Diakses Pada 30 November 2021]
- Adelia Ratnasari, (2016). Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Industry Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015). Journal Online. <http://repository.ibs.ac.id/411/> [Diakses Pada 25 Oktober 2021]
- Anisa Feraristy, (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Subsector Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2013-2017). Skripsi-S1. Universitas Sriwijaya. [Diakses Pada 25 Oktober 2021]
- Arga Nugraha, (2018). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Corporate Governance, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2016. Skripsi-S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. [Diakses Pada 25 Januari 2020]
- Badan Pusat Statistik. (2019). Diambil dari <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/relasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html>
- Bursa Efek Indonesia. (2020). IDX. Diambil dari Bursa Efek Indonesi website: <https://www.idx.co.id/> (diakses pada Januari 2022)
- Cahyaning Dewi Handayani, (2015). Pengaruh Return On Asset, Karakter Eksekutif, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Tax Avoidance. Skripsi-S1. Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Diakses Pada 25 Januari 2020]
- Desy Fitri Astuti, (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Journal Online. Universitas Islam Batik Surakarta. <http://ekonomis.unbari.id/index.php/ojsekonomis/article/view/101> [Diakses Pada 17 Oktober 2021]
- Fransiska Marintan Napitupulu, (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Skripsi Strata-1.

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/883> [Diakses Pada 6 Oktober 2020]

Herlina Ayudya Wibowo, (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Skripsi-S1. Universitas Semarang. [Diakses Pada 5 Desember 2021]

I Wayan Kartana, (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakter Perusahaan Dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Online. Vol 10. No 1. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/Krisna> [Diakses Pada 25 Januari 2020]

Judi Budiman, Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Journal Online. Universitas Gadjah Mada <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/54398> [Diakses Pada 25 Januari 2020]

Khairunnisa Alviani, (2016). Pengaruh Corporate Governabce, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2014). Jurnal Online . Jom Fekom, Vol.3 No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/12472-ID-pengaruh-corporate-governance-karakter-e.pdf> [Diakses Pada 6 Oktober 2020]

Mardiasmo, Prof., Drs., M.Ba., Ak. (2018) Perpajakan. Edisi Revisi.

Ni Nyoman Kristina Dewi, (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. Journal Online. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7929/> Universitas Udayana [Diakses Pada 5 Desember 2021]

Raditya Ekaputra, (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Journal Online. Volume 3. Universitas Maritim Raja Ali Haji. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jjai/article/view/2206/> [Diakses Pada 5 Desember 2021]

Resmi, Siti. (2019) Perpajakan Teori & Kasus. Edisi Sepuluh Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

- Ridha Amaliyah, Peran Komisaris Independent Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Journal Online. Universitas Trilogi Jakarta Selatan <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAK/article/viewFile/461280> [Diakses Pada 13 Juni 2022]
- Senja Septiana Dewi, (2020). Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badam (Pada Perusahaan Sekto Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018). Skripsi-S1. Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Suandy, E. (2016) Perencanaan Pajak. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat
- Uun Sunarsih, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Dapa Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Online. Universitas Katolik Indonesia. <http://repository.stei.ac.id/1999/> [Diakses Pada 30 November 2021]
- Tati Yulia Okrayanti, (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI). Jurnal Online. Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi. Universitas PGRI Madiun. <http://openjurnal.unpam.ac.id/index.php/EPR/article/view/5291> [Diakses Pada 6 Oktober 2020]
- Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak Edisi ke 6. Jakarta: Salemba Empat
- Wendaka Setiya Pratama, (2019). Pengaruh Karakter Risiko Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independent Sebagai Variable Moderating: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017. Journal Online. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/8407/> [Diakses Pada 17 Oktober 2021]
- Windi Erlina Mandasari, (2020) Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018). *Skripsi*. Fakultas Ekomomi Universitas Pakuan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mugi Rahayu
Alamat : Ds. Tunggul Rt.02 / Rw.20, Kel. Gunungan
Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa
Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 November 1996
Umur : 26 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN 5 Gunungan
• SMP : MTs N Manyaran
• SMK : SMK Tunas Bangsa Tawang Sari
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Agustus 2023

Peneliti

Mugi Rahayu

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perhitungan Karakter Eksekutif (*Risk*) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019

Karakter Eksekutif di proksikan menggunakan *Risk* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Risk = \frac{\Delta Ebitda\ t - t_{-1}}{\Delta Total\ Aset\ Perusahaan\ t - t_{-1}}$$

Perhitungan Karakter Eksekutif						
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Ebitda (Rp)	STDV	RISK
1	UNVR	2015	15.729.945.000.000	7.829.490.000.000	1.644.795.220.962	0,104
	UNVR	2016	16.745.695.000.000	8.571.885.000.000		0,098
	UNVR	2017	18.906.413.000.000	9.371.661.000.000		0,086
	UNVR	2018	20.326.869.000.000	12.148.087.000.000		0,08
	UNVR	2019	20.649.371.000.000	9.901.772.000.000		0,079
2	HMSP	2015	38.010.724.000.000	13.932.644.000.000	1.714.145.520.054	0,045
	HMSP	2016	42.508.277.000.000	17.011.447.000.000		0,04
	HMSP	2017	43.141.063.000.000	16.894.806.000.000		0,039
	HMSP	2018	46.602.420.000.000	17.961.269.000.000		0,036
	HMSP	2019	50.902.806.000.000	18.259.423.000.000		0,033
3	ICBP	2015	26.560.624.000.000	4.009.634.000.000	1.336.692.593.691	0,05
	ICBP	2016	28.901.948.000.000	4.989.254.000.000		0,046
	ICBP	2017	31.619.514.000.000	5.206.561.000.000		0,042
	ICBP	2018	34.367.153.000.000	6.446.785.000.000		0,038
	ICBP	2019	38.709.314.000.000	7.436.972.000.000		0,034
4	KLBF	2015	13.696.417.381.439	2.720.881.244.459	266.534.572.863	0,019
	KLBF	2016	15.226.009.210.657	3.091.188.460.230		0,017
	KLBF	2017	16.616.239.416.335	3.241.186.725.922		0,016
	KLBF	2018	18.146.206.145.369	3.306.399.669.021		0,014
	KLBF	2019	20.264.726.862.584	3.402.616.824.533		0,013
5	GGRM	2015	63.505.413.000.000	8.635.275.000.000	2.334.570.207.370	0,036
	GGRM	2016	62.951.634.000.000	8.931.136.000.000		0,037
	GGRM	2017	66.759.930.000.000	10.436.512.000.000		0,034
	GGRM	2018	69.097.219.000.000	10.479.242.000.000		0,033
	GGRM	2019	78.647.274.000.000	14.487.736.000.000		0,029
6	MYOR	2015	11.342.715.686.221	1.640.494.765.801	422.722.338.448	0,037
	MYOR	2016	12.922.421.859.142	1.845.683.269.238		0,032
	MYOR	2017	14.915.849.800.251	2.186.884.603.474		0,028
	MYOR	2018	17.591.706.426.634	2.381.941.198.855		0,024
	MYOR	2019	19.037.918.806.473	2.704.466.581.011		0,022

Perhitungan Karakter Eksekutif						
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Ebitda (Rp)	STDV	RISK
7	INDF	2015	91.831.526.000.000	4.962.084.000.000	1.383.498.078.965	0,015
	INDF	2016	82.174.515.000.000	7.385.288.000.000		0,016
	INDF	2017	88.400.877.000.000	7.594.822.000.000		0,015
	INDF	2018	96.537.796.000.000	7.446.966.000.000		0,014
	INDF	2019	96.189.559.000.000	8.749.397.000.000		0,014
8	ULTJ	2015	3.539.995.910.248	700.675.250.229	244.374.365.126	0,069
	ULTJ	2016	4.239.199.641.365	932.482.782.652		0,057
	ULTJ	2017	5.175.896.000.000	1.035.192.000.000		0,047
	ULTJ	2018	5.555.871.000.000	949.018.000.000		0,043
	ULTJ	2019	6.608.422.000.000	1.375.359.000.000		0,036
9	MLBI	2015	2.042.513.000.000	675.572.000.000	447.148.291.685	0,218
	MLBI	2016	2.275.038.000.000	1.320.186.000.000		0,196
	MLBI	2017	2.156.593.000.000	1.780.020.000.000		0,207
	MLBI	2018	2.889.501.000.000	1.671.912.000.000		0,154
	MLBI	2019	2.896.950.000.000	1.626.612.000.000		0,154
10	KAEF	2015	3.434.879.313.034	354.904.735.867	262.895.063.761	0,076
	KAEF	2016	4.612.562.541.064	383.025.924.570		0,056
	KAEF	2017	6.096.148.972.533	449.709.762.422		0,043
	KAEF	2018	9.460.427.317.681	775.296.047.000		0,027
	KAEF	2019	18.352.877.132.000	38.315.488.000		0,014
11	ROTI	2015	2.706.323.637.034	78.251.615.088	98.360.845.468	0,036
	ROTI	2016	2.919.640.858.718	369.416.841.698		0,033
	ROTI	2017	4.559.573.709.411	186.147.334.530		0,021
	ROTI	2018	4.393.810.380.883	186.936.324.915		0,022
	ROTI	2019	4.682.083.844.951	347.098.820.613		0,021
12	KINO	2015	3.211.234.658.570	336.923.332.210	197.372.159.199	0,061
	KINO	2016	3.284.504.424.358	219.312.978.691		0,06
	KINO	2017	3.237.595.219.274	140.964.951.060		0,06
	KINO	2018	3.592.164.205.408	200.385.373.873		0,054
	KINO	2019	4.695.764.958.883	636.096.776.179		0,042
13	SKLT	2015	377.110.748.359	27.376.238.223	13.304.536.324	0,035
	SKLT	2016	568.239.939.951	25.166.206.536		0,023
	SKLT	2017	636.284.210.210	27.370.565.356		0,02
	SKLT	2018	747.293.275.435	39.567.679.343		0,017
	SKLT	2019	790.845.543.826	56.782.206.578		0,016
14	MERK	2015	641.646.818.000	193.940.841.000	69.756.622.604	0,1
	MERK	2016	743.934.894.000	214.916.161.000		0,093
	MERK	2017	847.006.544.000	205.784.642.000		0,082
	MERK	2018	1.263.113.689.000	50.208.396.000		0,055
	MERK	2019	901.060.986.000	125.899.182.000		0,077
15	CEKA	2015	1.485.826.210.015	142.271.353.890	82.097.718.450	0,055

Perhitungan Karakter Eksekutif						
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Ebitda (Rp)	STDV	RISK
	CEKA	2016	1.425.964.152.418	285.827.837.455		0,057
	CEKA	2017	1.392.636.444.501	143.195.939.366		0,058
	CEKA	2018	1.168.956.042.706	123.394.812.359		0,07
	CEKA	2019	1.393.079.542.074	285.132.249.695		0,058
16	ADES	2015	653.224.000.000	44.175.000.000	25.863.060.443	0,039
	ADES	2016	767.479.000.000	61.636.000.000		0,033
	ADES	2017	840.236.000.000	51.095.000.000		0,03
	ADES	2018	881.275.000.000	70.060.000.000		0,029
	ADES	2019	822.375.000.000	110.179.000.000		0,031
17	SKBM	2015	764.484.248.710	53.629.853.878	17.677.841.743	0,023
	SKBM	2016	1.001.657.012.004	30.809.950.308		0,017
	SKBM	2017	1.771.365.972.009	31.761.022.154		0,009
	SKBM	2018	1.623.027.475.045	20.887.453.647		0,01
	SKBM	2019	1.820.383.352.811	5.163.201.735		0,009
18	BUDI	2015	3.265.953.000.000	52.125.000.000	13.517.087.656	0,004
	BUDI	2016	2.931.807.000.000	52.832.000.000		0,004
	BUDI	2017	2.939.456.000.000	61.016.000.000		0,004
	BUDI	2018	3.392.980.000.000	71.781.000.000		0,003
	BUDI	2019	2.999.767.000.000	83.905.000.000		0,004
19	CINT	2015	382.807.494.765	40.762.330.489	11.192.921.526	0,029
	CINT	2016	399.336.626.636	28.172.913.292		0,028
	CINT	2017	476.577.841.605	38.318.872.398		0,023
	CINT	2018	491.382.035.136	22.090.078.956		0,022
	CINT	2019	521.493.784.876	13.896.350.693		0,021
20	STTP	2015	1.919.568.037.170	232.005.398.773	158.605.746.538	0,082
	STTP	2016	2.336.411.494.941	217.746.308.540		0,067
	STTP	2017	2.342.432.443.196	288.545.819.603		0,067
	STTP	2018	1.380.382.987.112	324.694.650.175		0,114
	STTP	2019	2.881.563.083.954	607.043.293.422		0,055
21	SCPI	2015	1.510.747.778.000	198.370.446.000	17.158.626.483	0,011
	SCPI	2016	1.393.083.772.000	223.074.487.000		0,012
	SCPI	2017	1.354.104.356.000	180.641.570.000		0,012
	SCPI	2018	1.635.702.779.000	193.103.981.000		0,01
	SCPI	2019	1.417.704.185.000	181.987.452.000		0,012

Lampiran 2

Perhitungan *Leverage* Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019

Leverage proksikan menggunakan DAR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Aset}}$$

Perhitungan <i>Leverage</i>					
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Hutang Jangka Panjang (Rp)	LEV
1	UNVR	2015	15.729.945.000.000	775.043.000.000	0,049
	UNVR	2016	16.745.695.000.000	1.163.363.000.000	0,069
	UNVR	2017	18.906.413.000.000	1.200.721.000.000	0,063
	UNVR	2018	20.326.869.000.000	1.669.380.000.000	0,082
	UNVR	2019	20.649.371.000.000	2.302.201.000.000	0,111
2	HMSP	2015	38.010.724.000.000	1.455.990.000.000	0,038
	HMSP	2016	42.508.277.000.000	1.904.785.000.000	0,044
	HMSP	2017	43.141.063.000.000	2.545.109.000.000	0,058
	HMSP	2018	46.602.420.000.000	2.450.168.000.000	0,052
	HMSP	2019	50.902.806.000.000	2.495.400.000.000	0,049
3	ICBP	2015	26.560.624.000.000	4.171.369.000.000	0,157
	ICBP	2016	28.901.948.000.000	3.931.340.000.000	0,136
	ICBP	2017	31.619.514.000.000	4.467.596.000.000	0,141
	ICBP	2018	34.367.153.000.000	4.424.605.000.000	0,128
	ICBP	2019	38.709.314.000.000	5.481.851.000.000	0,141
4	KLBF	2015	13.696.417.381.439	392.520.905.307	0,028
	KLBF	2016	15.226.009.210.657	445.000.282.472	0,029
	KLBF	2017	16.616.239.416.335	494.871.621.931	0,029
	KLBF	2018	18.146.206.145.369	565.443.877.421	0,031
	KLBF	2019	20.264.726.862.584	982.035.580.702	0,048
5	GGRM	2015	63.505.413.000.000	1.452.418.000.000	0,022
	GGRM	2016	62.951.634.000.000	1.748.841.000.000	0,027
	GGRM	2017	66.759.930.000.000	1.961.224.000.000	0,029
	GGRM	2018	69.097.219.000.000	1.960.367.000.000	0,028
	GGRM	2019	78.647.274.000.000	2.457.789.000.000	0,031
6	MYOR	2015	11.342.715.686.221	6.148.255.759.034	0,542
	MYOR	2016	12.922.421.859.142	6.657.165.872.077	0,515
	MYOR	2017	14.915.849.800.251	3.087.875.111.223	0,207
	MYOR	2018	17.591.706.426.634	4.284.651.557.827	0,243
	MYOR	2019	19.037.918.806.473	5.411.619.071.954	0,284

Perhitungan <i>Leverage</i>					
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Hutang Jangka Panjang (Rp)	LEV
7	INDF	2015	91.831.526.000.000	23.602.395.000.000	0,257
	INDF	2016	82.174.515.000.000	19.013.561.000.000	0,231
	INDF	2017	88.400.877.000.000	19.660.348.000.000	0,222
	INDF	2018	96.537.796.000.000	15.416.894.000.000	0,159
	INDF	2019	96.189.559.000.000	17.309.209.000.000	0,179
8	ULTJ	2015	3.539.995.910.248	99.095.151.402	0,027
	ULTJ	2016	4.239.199.641.365	71.985.522.862	0,016
	ULTJ	2017	5.175.896.000.000	157.560.000.000	0,03
	ULTJ	2018	5.555.871.000.000	145.754.000.000	0,026
	ULTJ	2019	6.608.422.000.000	116.969.000.000	0,017
9	MLBI	2015	2.042.513.000.000	88.568.000.000	0,043
	MLBI	2016	2.275.038.000.000	128.137.000.000	0,056
	MLBI	2017	2.156.593.000.000	155.578.000.000	0,072
	MLBI	2018	2.889.501.000.000	143.046.000.000	0,049
	MLBI	2019	2.896.950.000.000	162.250.000.000	0,056
10	KAEF	2015	3.434.879.313.034	285.695.906.949	0,083
	KAEF	2016	4.612.562.541.064	644.946.264.289	0,139
	KAEF	2017	6.096.148.972.533	1.154.120.768.638	0,189
	KAEF	2018	9.460.427.317.681	2.329.663.106.364	0,246
	KAEF	2019	18.352.877.132.000	3.547.810.027.000	0,193
11	ROTI	2015	2.706.323.637.034	1.121.868.678.348	0,414
	ROTI	2016	2.919.640.858.718	1.156.387.262.310	0,396
	ROTI	2017	4.559.573.709.411	712.291.462.742	0,156
	ROTI	2018	4.393.810.380.883	951.487.110.723	0,216
	ROTI	2019	4.682.083.844.951	482.548.147.289	0,103
12	KINO	2015	3.211.234.658.570	143.583.834.900	0,044
	KINO	2016	3.284.504.424.358	111.653.704.511	0,033
	KINO	2017	3.237.595.219.274	96.858.033.700	0,029
	KINO	2018	3.592.164.205.408	88.940.816.912	0,024
	KINO	2019	4.695.764.958.883	259.767.155.647	0,055
13	SKLT	2015	377.110.748.359	65.933.237.971	0,174
	SKLT	2016	568.239.939.951	102.786.060.143	0,18
	SKLT	2017	636.284.210.210	117.221.275.463	0,184
	SKLT	2018	747.293.275.435	116.708.612.900	0,156
	SKLT	2019	790.845.543.826	117.182.231.079	0,148
14	MERK	2015	641.646.818.000	35.667.641.000	0,055
	MERK	2016	743.934.894.000	40.640.296.000	0,054
	MERK	2017	847.006.544.000	46.598.015.000	0,055
	MERK	2018	1.263.113.689.000	35.396.131.000	0,028
	MERK	2019	901.060.986.000	37.964.163.000	0,042

Perhitungan <i>Leverage</i>					
No	KODE	Tahun	Total Aset (Rp)	Hutang Jangka Panjang (Rp)	LEV
15	CEKA	2015	1.485.826.210.015	29.461.394.411	0,019
	CEKA	2016	1.425.964.152.418	33.835.271.614	0,023
	CEKA	2017	1.392.636.444.501	45.209.179.614	0,032
	CEKA	2018	1.168.956.042.706	34.052.874.614	0,029
	CEKA	2019	1.393.079.542.074	39.344.314.614	0,028
16	ADES	2015	653.224.000.000	125.491.000.000	0,192
	ADES	2016	767.479.000.000	187.625.000.000	0,244
	ADES	2017	840.236.000.000	172.337.000.000	0,205
	ADES	2018	881.275.000.000	136.964.000.000	0,155
	ADES	2019	822.375.000.000	79.247.000.000	0,096
17	SKBM	2015	764.484.248.710	121.979.429.549	0,159
	SKBM	2016	1.001.657.012.004	164.287.924.725	0,164
	SKBM	2017	1.771.365.972.009	88.193.264.140	0,049
	SKBM	2018	1.623.027.475.045	115.282.593.709	0,071
	SKBM	2019	1.820.383.352.811	115.631.469.926	0,063
18	BUDI	2015	3.265.953.000.000	676.009.000.000	0,206
	BUDI	2016	2.931.807.000.000	669.593.000.000	0,228
	BUDI	2017	2.939.456.000.000	724.770.000.000	0,246
	BUDI	2018	3.392.980.000.000	698.988.000.000	0,206
	BUDI	2019	2.999.767.000.000	580.764.000.000	0,193
19	CINT	2015	382.807.494.765	8.868.213.307	0,023
	CINT	2016	399.336.626.636	11.201.910.184	0,028
	CINT	2017	476.577.841.605	28.289.302.555	0,059
	CINT	2018	491.382.035.136	21.627.543.807	0,044
	CINT	2019	521.493.784.876	26.345.627.806	0,05
20	STTP	2015	1.919.568.037.170	356.267.550.945	0,185
	STTP	2016	2.336.411.494.941	611.147.044.637	0,261
	STTP	2017	2.342.432.443.196	598.696.937.342	0,255
	STTP	2018	1.380.382.987.112	308.128.298.170	0,223
	STTP	2019	2.881.563.083.954	325.065.525.323	0,112
21	SCPI	2015	1.510.747.778.000	989.115.069.000	0,654
	SCPI	2016	1.393.083.772.000	944.398.926.000	0,677
	SCPI	2017	1.354.104.356.000	148.504.151.000	0,109
	SCPI	2018	1.635.702.779.000	633.883.546.000	0,387
	SCPI	2019	1.417.704.185.000	613.102.396.000	0,432

Lampiran 3

Perhitungan *Corporate Governance* (IND) Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019

Corporate Governance di proksikan menggunakan Komisaris Independen (IND) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IND = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Perhitungan <i>Corporate Governance</i>					
No	KODE	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	IND
1	UNVR	2015	2	5	0,4
	UNVR	2016	2	5	0,4
	UNVR	2017	3	5	0,6
	UNVR	2018	3	5	0,6
	UNVR	2019	3	5	0,6
2	HMSP	2015	2	5	0,4
	HMSP	2016	2	5	0,4
	HMSP	2017	2	5	0,4
	HMSP	2018	2	6	0,3
	HMSP	2019	3	7	0,4
3	ICBP	2015	3	6	0,5
	ICBP	2016	3	6	0,5
	ICBP	2017	3	6	0,5
	ICBP	2018	3	6	0,5
	ICBP	2019	3	6	0,5
4	KLBF	2015	3	7	0,428
	KLBF	2016	3	7	0,428
	KLBF	2017	3	7	0,428
	KLBF	2018	2	6	0,333
	KLBF	2019	3	7	0,428
5	GGRM	2015	2	4	0,5
	GGRM	2016	2	4	0,5
	GGRM	2017	2	4	0,5
	GGRM	2018	2	4	0,5
	GGRM	2019	2	4	0,5
6	MYOR	2015	2	5	0,4
	MYOR	2016	2	5	0,4
	MYOR	2017	2	5	0,4
	MYOR	2018	2	5	0,4
	MYOR	2019	2	5	0,4
7	INDF	2015	3	8	0,375
	INDF	2016	3	8	0,375

Perhitungan Corporate Governance					
No	KODE	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	IND
	INDF	2017	3	8	0,375
	INDF	2018	3	8	0,375
	INDF	2019	3	8	0,375
8	ULTJ	2015	1	3	0,333
	ULTJ	2016	1	3	0,333
	ULTJ	2017	1	3	0,333
	ULTJ	2018	2	4	0,5
	ULTJ	2019	2	4	0,5
9	MLBI	2015	3	6	0,5
	MLBI	2016	3	6	0,5
	MLBI	2017	3	6	0,5
	MLBI	2018	3	6	0,5
	MLBI	2019	3	6	0,5
10	KAEF	2015	1	4	0,25
	KAEF	2016	1	5	0,2
	KAEF	2017	1	5	0,2
	KAEF	2018	2	5	0,4
	KAEF	2019	2	5	0,4
11	ROTI	2015	1	3	0,333
	ROTI	2016	1	3	0,333
	ROTI	2017	1	3	0,333
	ROTI	2018	1	3	0,333
	ROTI	2019	1	3	0,333
12	KINO	2015	1	3	0,333
	KINO	2016	2	4	0,5
	KINO	2017	2	4	0,5
	KINO	2018	2	4	0,5
	KINO	2019	2	4	0,5
13	SKLT	2015	1	3	0,333
	SKLT	2016	1	3	0,333
	SKLT	2017	1	3	0,333
	SKLT	2018	1	3	0,333
	SKLT	2019	1	3	0,333
14	MERK	2015	1	3	0,333
	MERK	2016	1	3	0,333
	MERK	2017	1	3	0,333
	MERK	2018	2	4	0,5
	MERK	2019	2	4	0,5
15	CEKA	2015	2	4	0,5
	CEKA	2016	2	4	0,5
	CEKA	2017	2	4	0,5
	CEKA	2018	2	4	0,5
	CEKA	2019	2	4	0,5

Perhitungan Corporate Governance					
No	KODE	Tahun	Komisaris Independen	Dewan Komisaris	IND
16	ADES	2015	1	3	0,333
	ADES	2016	1	3	0,333
	ADES	2017	1	3	0,333
	ADES	2018	1	3	0,333
	ADES	2019	1	3	0,333
17	SKBM	2015	1	3	0,333
	SKBM	2016	1	3	0,333
	SKBM	2017	1	3	0,333
	SKBM	2018	1	3	0,333
	SKBM	2019	1	3	0,333
18	BUDI	2015	1	3	0,333
	BUDI	2016	1	3	0,333
	BUDI	2017	1	3	0,333
	BUDI	2018	1	3	0,333
	BUDI	2019	1	3	0,333
19	CINT	2015	1	2	0,5
	CINT	2016	1	2	0,5
	CINT	2017	1	2	0,5
	CINT	2018	1	2	0,5
	CINT	2019	1	2	0,5
20	STTP	2015	1	2	0,5
	STTP	2016	1	2	0,5
	STTP	2017	1	2	0,5
	STTP	2018	1	2	0,5
	STTP	2019	1	2	0,5
21	SCPI	2015	1	3	0,333
	SCPI	2016	1	3	0,333
	SCPI	2017	1	3	0,333
	SCPI	2018	1	3	0,333
	SCPI	2019	1	3	0,333

Lampiran 4

Perhitungan *Tax Avoidance* Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2015-2019

Tax Avoidance dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Perhitungan Penghindaran Pajak					
No	KODE	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Pendapatan Sebelum Pajak (Rp)	<i>Tax Avoidane</i>
1	UNVR	2015	1.977.685.000.000	7.829.490.000.000	0,253
	UNVR	2016	2.181.213.000.000	8.571.885.000.000	0,254
	UNVR	2017	2.367.099.000.000	9.371.661.000.000	0,253
	UNVR	2018	3.076.319.000.000	2.185.764.000.000	0,252
	UNVR	2019	2.508.935.000.000	9.901.772.000.000	0,253
2	HMSP	2015	3.569.336.000.000	13.932.644.000.000	0,256
	HMSP	2016	4.249.218.000.000	17.011.447.000.000	0,249
	HMSP	2017	4.224.272.000.000	16.894.806.000.000	0,250
	HMSP	2018	4.422.851.000.000	17.961.269.000.000	0,246
	HMSP	2019	4.537.910.000.000	18.259.423.000.000	0,248
3	ICBP	2015	1.086.486.000.000	4.009.634.000.000	0,271
	ICBP	2016	1.357.953.000.000	4.989.254.000.000	0,272
	ICBP	2017	1.663.388.000.000	5.206.561.000.000	0,319
	ICBP	2018	1.788.004.000.000	6.446.785.000.000	0,277
	ICBP	2019	2.076.943.000.000	7.436.972.000.000	0,279
4	KLBF	2015	663.186.962.586	2.720.881.224.459	0,244
	KLBF	2016	740.303.526.679	3.091.188.460.230	0,239
	KLBF	2017	787.935.315.388	3.241.186.725.992	0,243
	KLBF	2018	809.137.704.264	3.306.399.669.021	0,244
	KLBF	2019	865.015.000.888	3.402.601.824.533	0,254
5	GGRM	2015	2.182.441.000.000	8.635.275.000.000	0,253
	GGRM	2016	2.258.454.000.000	8.931.136.000.000	0,253
	GGRM	2017	2.681.165.000.000	10.436.512.000.000	0,257
	GGRM	2018	2.686.174.000.000	10.479.242.000.000	0,256
	GGRM	2019	3.607.032.000.000	14.487.736.000.000	0,249
6	MYOR	2015	390.261.637.241	1.640.494.765.801	0,239

Perhitungan Penghindaran Pajak					
No	KODE	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Pendapatan Sebelum Pajak (Rp)	Tax Avoidance
	MYOR	2016	457.007.141.573	1.845.683.269.238	0,247
	MYOR	2017	555.930.772.581	2.186.884.603.474	0,254
	MYOR	2018	621.507.918.551	2.381.942.198.855	0,261
	MYOR	2019	665.062.374.247	2.704.466.581.011	0,246
7	INDF	2015	1.730.371.000.000	4.962.084.000.000	0,348
	INDF	2016	2.532.747.000.000	7.385.228.000.000	0,343
	INDF	2017	2.513.491.000.000	7.658.554.000.000	0,328
	INDF	2018	2.485.115.000.000	7.446.966.000.000	0,333
	INDF	2019	2.846.668.000.000	8.749.397.000.000	0,325
8	ULTJ	2015	177.575.035.200	700.675.250.229	0,253
	ULTJ	2016	222.657.146.910	932.482.782.652	0,238
	ULTJ	2017	316.790.000.000	1.035.192.000.000	0,306
	ULTJ	2018	247.411.000.000	949.018.000.000	0,260
	ULTJ	2019	339.494.000.000	1.375.359.000.000	0,246
9	MLBI	2015	178.663.000.000	675.572.000.000	0,264
	MLBI	2016	338.057.000.000	1.320.186.000.000	0,256
	MLBI	2017	457.953.000.000	1.780.020.000.000	0,257
	MLBI	2018	447.105.000.000	1.671.912.000.000	0,267
	MLBI	2019	420.553.000.000	1.626.612.000.000	0,258
10	KAEF	2015	89.354.973.785	354.904.735.867	0,252
	KAEF	2016	111.427.977.007	383.025.924.670	0,291
	KAEF	2017	118.001.844.961	449.709.762.422	0,262
	KAEF	2018	175.933.518.563	577.726.327.511	0,304
	KAEF	2019	22.425.049.000	38.315.488.000	0,585
11	ROTI	2015	107.712.914.648	378.251.615.088	0,284
	ROTI	2016	89.639.472.867	369.416.841.698	0,242
	ROTI	2017	50.783.313.391	186.147.334.530	0,272
	ROTI	2018	59.764.888.552	186.936.324.915	0,319
	ROTI	2019	110.580.263.193	347.098.820.613	0,318
12	KINO	2015	73.943.129.784	336.923.332.210	0,219
	KINO	2016	38.202.824.881	219.312.978.691	0,174
	KINO	2017	31.268.949.262	140.964.951.060	0,221
	KINO	2018	50.269.328.831	150.116.045.042	0,334
	KINO	2019	120.493.436.530	636.096.776.179	0,189

Perhitungan Penghindaran Pajak					
No	KODE	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Pendapatan Sebelum Pajak (Rp)	Tax Avoidane
13	SKLT	2015	8.178.868.239	27.376.238.223	0,298
	SKLT	2016	4.519.905.462	25.166.206.536	0,179
	SKLT	2017	4.399.850.008	27.370.565.356	0,161
	SKLT	2018	7.613.548.091	39.567.679.343	0,192
	SKLT	2019	11.838.578.678	56.782.206.578	0,208
14	MERK	2015	51.395.379.000	193.940.841.000	0,265
	MERK	2016	61.073.314.000	214.916.161.000	0,284
	MERK	2017	61.107.348.000	205.784.642.000	0,297
	MERK	2018	12.830.660.000	50.208.396.000	0,255
	MERK	2019	47.642.385.000	125.899.182.000	0,378
15	CEKA	2015	35.721.906.910	142.271.353.890	0,251
	CEKA	2016	36.130.823.829	285.827.837.455	0,126
	CEKA	2017	35.775.052.527	143.195.939.366	0,249
	CEKA	2018	30.745.155.584	123.394.812.359	0,249
	CEKA	2019	69.673.049.453	285.132.249.695	0,244
16	ADES	2015	11.336.000.000	44.175.000.000	0,256
	ADES	2016	5.685.000.000	61.636.000.000	0,092
	ADES	2017	12.853.000.000	51.095.000.000	0,252
	ADES	2018	17.102.000.000	70.060.000.000	0,244
	ADES	2019	26.294.000.000	110.179.000.000	0,238
17	SKBM	2015	13.479.285.258	53.629.853.878	0,251
	SKBM	2016	8.264.494.258	30.809.950.308	0,268
	SKBM	2017	5.880.557.363	31.761.022.154	0,185
	SKBM	2018	4.932.821.175	20.887.453.647	0,236
	SKBM	2019	4.206.032.677	5.163.201.735	0,814
18	BUDI	2015	31.053.000.000	52.125.000.000	0,595
	BUDI	2016	14.208.000.000	52.832.000.000	0,268
	BUDI	2017	15.325.000.000	61.016.000.000	0,251
	BUDI	2018	21.314.000.000	71.781.000.000	0,296
	BUDI	2019	19.884.000.000	83.905.000.000	0,236
19	CINT	2015	11.284.522.975	40.762.330.489	0,276
	CINT	2016	7.553.603.434	28.172.913.292	0,268
	CINT	2017	8.670.611.306	38.318.872.398	0,226
	CINT	2018	8.535.926.795	22.090.078.956	0,386

Perhitungan Penghindaran Pajak					
No	KODE	Tahun	Beban Pajak Penghasilan (Rp)	Pendapatan Sebelum Pajak (Rp)	Tax Avoidance
	CINT	2019	6.675.284.777	13.896.350.693	0,480
20	STTP	2015	46.300.197.602	232.005.398.773	0,199
	STTP	2016	43.569.590.674	217.746.308.540	0,2
	STTP	2017	72.521.739.769	288.545.819.603	0,251
	STTP	2018	69.605.764.156	324.694.650.175	0,214
	STTP	2019	124.452.770.582	607.043.293.422	0,205
21	SCPI	2015	59.048.748.000	198.370.446.000	0,297
	SCPI	2016	88.347.216.000	223.074.487.000	0,396
	SCPI	2017	58.126.560.000	180.641.570.000	0,321
	SCPI	2018	66.012.339.000	193.103.981.000	0,341
	SCPI	2019	69.334.926.000	181.987.452.000	0,381